



Mahkamah Agung | Ditjenbadilmiltun
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

2025

**#bangga
melayani
bangsa** **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



(021) 22859672

www.ptun-jakarta.go.id



Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo
Gebang, Jakarta Timur, 13950





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950
No.Telp 021-22859672 ; Website : www.ptun-jakarta.go.id ; E-mail : ptun.jakarta@gmail.com

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Reviu Lanjutan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta



H. Husban, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atas pelaksanaan anggaran negara serta penyelenggaraan pelayanan hukum kepada masyarakat. Fokus utama dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja berbasis hasil (*outcome*), evaluasi capaian kinerja serta pengungkapan analisa yang memadai terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025.

Penyusunan LKjIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel kepada pemberi mandat serta seluruh pemangku kepentingan. Laporan ini juga menjadi saran refleksi atas kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan, sekaligus sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan peradilan dimasa yang akan datang.

LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 disusun dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung RI dan badan di bawahnya terkait penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja Penyesuaian LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan ini disusun selaras dengan kebijakan pedoman, dan arahan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait penguatan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Laporan ini dapat tersusun berkat kerja sama, dedikasi, dan kontribusi seluruh aparatur di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kami berharap LKjIP ini mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama Tahun 2025, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis, inovasi, dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kerja sama dalam penyusunan LKjIP.

Jakarta, 27 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta



H. Husban, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Dengan adanya surat tersebut di atas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai kawal depan Mahkamah Agung untuk memberikan pertanggungjawaban kinerjanya berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2025. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan Tata Usaha Negara, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Pada tahun anggaran 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3 program / kegiatan utama untuk mencapai tujuan :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

- a. Penyelesaian perkara Tata Usaha Negara
- b. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Eksekusi yang lengkap dan tepat waktu
- c. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
- e. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Tata Usaha Negara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

- a. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional perkantoran)
- b. Layanan perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

- a. Perangkat pengolah data dan komunikasi
- b. Peralatan dan fasilitas perkantoran, meliputi : peralatan dan fasilitas perkantoran
- c. Gedung/bangunan, meliputi: gedung dan bangunan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil merangkum pencapaian dan tanggung jawabnya dalam LKjIP Tahun 2025, mencerminkan komitmen pada reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Dengan implementasi program dan kinerja utama, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkontribusi pada visi dan misi instansi serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan keadilan.

Pada tahun 2025, informasi terkait target, realisasi dan capaian masing-masing indikator kinerja sampai dengan Januari – September 2025 dapat ditemukan dalam tabel berikut :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan akuntabel			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	78,28%	97,85%
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
- Banding	32%	52,01%	162,53%
- Kasasi	27%	65,14%	241,26%
Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%	96,27%	148,10%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65%	100%	153,84%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	100%	166,67%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	67%	100%	149,23%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%	47,62%	95,24%

Tabel 1. 1. Tabel Capaian & Realisasi IKU Triwulan I – III Tahun 2025

Pada triwulan IV Tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2710/SEK/RAI.1.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tahun 2025-2029 sebagai landasan penguatan manajemen kinerja peradilan yang modern dan akuntabel. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penyesuaian dan penyelarasan IKU secara komprehensif sesuai karakteristik satuan kerja dan capaian kinerja sebelumnya. Penetapan IKU ini menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas penyelesaian perkara, pelayanan publik, serta akuntabilitas dan integritas kinerja secara berkelanjutan dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern.			
	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%	79,47%	113,53%
	b. Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	100%	117,65%
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh	85%	100%	117,65%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	pengadilan pengaju kepada para pihak.			
	d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	100%	125%
	e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	35%	58,06%	165,89%
	f. Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	98%	100%	102,04%
Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik				
2.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,70	3,85	104,05%
Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional				
3.	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%	78,08%	104,11%
	b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90% 90%	91,89% 85,92%	102,1% 95,47%
	c. Nilai kerja Perencanaan Anggaran	85% 85%	95,95% 87,95%	112,88% 103,47%
	d. Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3%	3,27%	109%

Tabel 1. 2. Tabel Realisasi & Capaian IKU Terbaru 2025

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah disusun dan ditetapkan 6

(enam) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 dengan Pagu DIPA 526732 sebesar Rp. 16.722.636.000,- (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga puluh Enam Ribu Rupiah) dan Pagu DIPA 525733 sebesar Rp. 63.660.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah).

Pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan diinformasikan sebagai laporan pencapaian hasil kinerja jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2025. Adapun pengukuran pencapaian kinerja dengan melihat sasaran, indikator sasaran, target yang diinginkan, realisasi, dan pencapaian target. Setiap keberhasilan dan kegagalan capaian indikator sasaran, diberikan analisis tentang hambatan dan kendala serta penyebab belum tercapainya target yang diinginkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
IKHTISAR EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY).....	5
DAFTAR TABEL	11
DAFTAR GAMBAR	13
BAB I.....	15
PENDAHULUAN.....	15
A. LATAR BELAKANG.....	15
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI.....	17
C. STRUKTUR ORGANISASI	19
D. ISU STRATEGIS	20
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	22
BAB II.....	34
PERENCANAAN KINERJA.....	34
A. RENCANA STRATEGIS	34
B. PERJANJIAN KINERJA	40
C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.....	43
BAB III.....	57
AKUNTABILITAS KINERJA	57
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	57
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	67
C. REALISASI ANGGARAN.....	141
BAB IV	152
PENUTUP	152
LAMPIRAN.....	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1. Tabel Capaian & Realisasi IKU Triwulan I – III Tahun 2025	7
Tabel 1. 2. Tabel Realisasi & Capaian IKU Terbaru 2025	8
Tabel 2. 1. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025	41
Tabel 2. 2. Tabel Realisasi dan Capaian Triwulan I -III Tahun 2025	47
Tabel 2. 3. Tabel Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I – III	50
Tabel 2. 4. Tabel Matriks Keadaan Perkara Tahun 2025.....	53
Tabel 2. 5. Tabel Reviu Perjanjian Kinerja 2025.....	55
Tabel 3. 1. Tabel Capaian Indikator Kinerja Triwulan I - III	58
Tabel 3. 2. Tabel Laporan Capaian Kinerja Per Bulan Tahun 2025	64
Tabel 3. 3. Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	67
Tabel 3. 4. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu	68
Tabel 3. 5. Tabel Data Penyelesaian Perkara dari Tahun 2021 – 2025	70
Tabel 3. 6. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.1. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	72
Tabel 3. 7 Tabel Capaian Indikator Kinerja Presentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak.....	73
Tabel 3. 8. Tabel Capaian Data Penyelesaian Perkara dari Tahun 2021 – 2025.....	75
Tabel 3. 9. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.2 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	77
Tabel 3. 10. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak	78
Tabel 3. 11. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.3 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	83
Tabel 3. 12. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	84
Tabel 3. 13. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.4 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	88
Tabel 3. 14. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan.....	88
Tabel 3. 15. Tabel Data Penyelesaian Permohonan Eksekusi dari Tahun 2021 – 2025	91
Tabel 3. 16. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.5 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	93
Tabel 3. 17. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan E-Court.....	94
Tabel 3. 18. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.6 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	98
Tabel 3. 19. Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan	99



Tabel 3. 20. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025	101
Tabel 3. 21. Tabel Data Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2021 – 2025	104
Tabel 3. 22. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2.1. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	107
Tabel 3. 23. Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	107
Tabel 3. 24. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3.1. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	111
Tabel 3. 25. Tabel Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	112
Tabel 3. 26. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3.2. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	118
Tabel 3. 27. Tabel Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 & DIPA 05	119
Tabel 3. 28. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3.3. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	124
Tabel 3. 29. Tabel Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.....	125
Tabel 3. 30. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3.4. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi	129
Tabel 3. 31. Tabel Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	131
Tabel 3. 32. Tabel Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	136
Tabel 3. 33. Tabel Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	144
Tabel 3. 34. Tabel Realisasi Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan	147
Tabel 3. 35. Tabel Realisasi Layanan Pemantauan dan Evaluasi	147
Tabel 3. 36. Tabel Realisasi Layanan Sarana Internal Pengadaan.....	148
Tabel 3. 37. Tabel Realisasi Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	148
Tabel 3. 38. Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05.....	149
Tabel 3. 39. Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dari Tahun 2021 - 2025.....	150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Struktur Organisasi PTUN Jakarta	20
Gambar 1. 2. Pohon Kinerja PTUN Jakarta.....	32
Gambar 3. 1. Bagan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.1.....	71
Gambar 3. 2. Bagan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.1.....	71
Gambar 3. 3. Bagan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.2.....	76
Gambar 3. 4. Bagan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.2.....	76
Gambar 3. 5. Bagan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.5.....	92
Gambar 3. 6. Bagan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.5	92
Gambar 3. 7. Tampilan Dashboard Aplikasi Survei IKM	100
Gambar 3. 8. Bagan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2.1.....	105
Gambar 3. 9. Bagan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.2.....	105
Gambar 3. 10. Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 01 di Aplikasi Monev Kemenkeu	121
Gambar 3. 11. Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 05 di Aplikasi Monev Kemenenkeu	121



Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang

disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektivitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara / pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2025.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

1. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Tugas Pokok

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi Pengadilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan TUN (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).

Di samping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25/2009 tentang Pelayanan Publik yang muatannya antara lain sebagai berikut :

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja.
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
4. Kejelasan risiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
6. Profesionalisme personil Pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

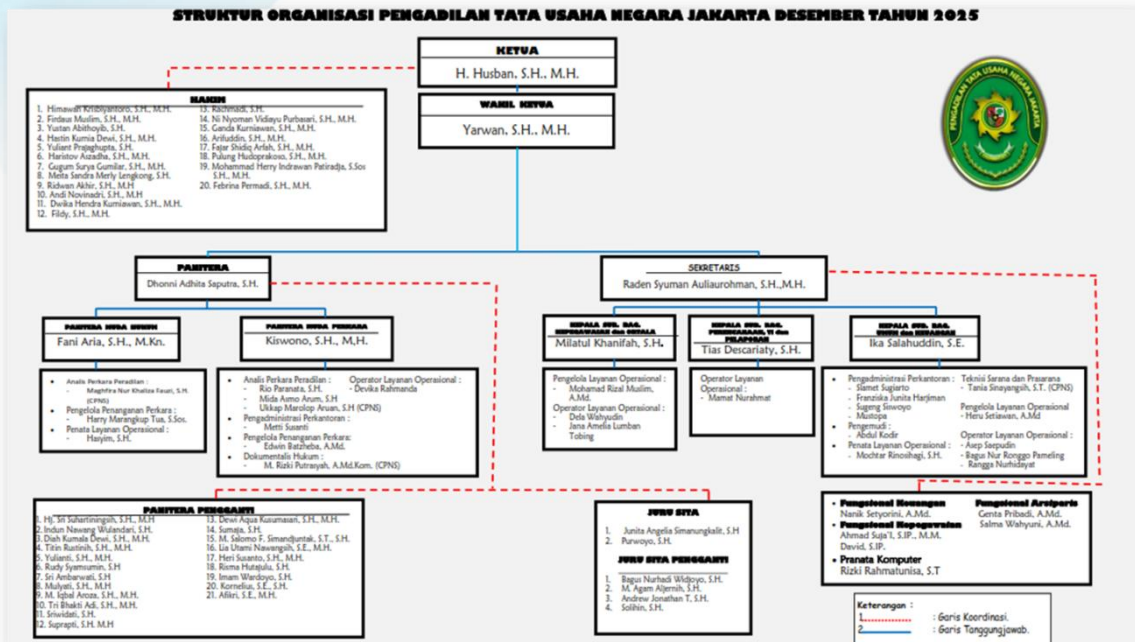
Kondisi-kondisi tersebut di atas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi **yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*)** yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

Dalam Standar Operasional (SOP) tersebut, telah diatur Standar Operasional Prosedur tentang:

1. Penerimaan Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama .
2. Pencatatan/Registrasi perkara masuk, PMH dan PHS .
3. Pendaftaran perkara dengan pembayaran cuma-cuma (Prodeo) .
4. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli .
5. Pemanggilan para pihak berperkara, saksi/saksi ahli.
6. Tata persidangan .
7. Penyelesaian perkara oleh Majelis Hakim .
8. Penyampaian Salinan Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Pengambilan Salinan Putusan, Penetapan oleh pihak yang berperkara.
10. Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara .
11. Proses pemberkasan perkara dan minutasasi .
12. Publikasi putusan (Direktori Putusan).
13. Pengarsipan berkas perkara .
14. Pengawasan Eksekusi.
15. Permohonan Banding .
16. Permohonan Perkara Kasasi .
17. Permohonan Perkara Peninjauan Kembali .
18. Penanganan Pengaduan Masyarakat .

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dengan terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan berubah menjadi berikut :



Gambar 1. 1. Struktur Organisasi PTUN Jakarta

Dengan komposisi Sumber Daya Manusia terdiri dari 1 orang Ketua, 1 Orang Wakil Ketua, 20 orang Hakim, 1 Orang Panitera, 1 orang Sekretaris, 2 Orang Panitera Muda, 3 Orang Kepala Sub Bagian, 21 orang Panitera Pengganti, 2 Orang Jurusita, 4 Orang Jurusita Pengganti, 21 orang Kesekretariatan dan 10 orang Kepaniteraan.

Dalam implementasi reformasi birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pendekatan yang formal dan terstruktur diperlukan. Langkah-langkah seperti perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, pengawasan yang ketat, dan evaluasi yang cermat harus menjadi landasan utama. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara harus dijalankan dengan penuh pertanggungjawaban, yang tercermin melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan ini tidak hanya menjadi kewajiban administratif, melainkan juga merupakan alat untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

D. ISU STRATEGIS

Peran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama adalah mengadili perkara pada tingkat pertama di wilayah

hukumnya, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah apabila diminta, serta melaksanakan fungsi pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum dan pelayanan riset/penelitian. Selain itu, pengadilan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang diwujudkan melalui pelaksanaan regulasi serta modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi guna mengatasi berbagai kendala penyelenggaraan peradilan, seperti lambatnya penanganan perkara, terbatasnya akses terhadap keadilan, serta permasalahan integritas dan profesionalisme aparatur.

Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

- Pelaksanaan proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Selain mengeluarkan regulasi dan melakukan penyempurnaan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada, sebagai wujud pelaksanaan aspek strategis dalam mengatasi berbagai isu kinerja, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga mendorong penguatan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui pengembangan berbagai inovasi layanan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses

pelayanan, efektivitas proses kerja, serta optimalisasi pencapaian kinerja organisasi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Implementasi inovasi berbasis digital tersebut menjadi bagian dari transformasi menuju peradilan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Beberapa inovasi yang telah dimiliki dan diimplementasikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara lain SI PITUNG (Sistem Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan) sebagai media integrasi layanan informasi, New e-Visitor (buku tamu elektronik) untuk mendukung tertib administrasi dan keamanan kunjungan, Aplikasi Jak-Aksi sebagai sarana pengelolaan pelaksanaan eksekusi perkara, Aplikasi E-Case Files untuk digitalisasi berkas perkara, serta sistem Antrian Sidang berbasis Teknologi Informasi guna meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan persidangan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance result*) 2025 tersbut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pola pikir tersebut, maka sistematika penyajian LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan , pada bagian ini disajikan penjelasan Umum Organisasi, dengan Penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja , pada Bab Ini diuraikan muatan rencana strategis 2025-2029 meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama dan kegiatan pokok,

Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025.

BAB III

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Bab Ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategi Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi ;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

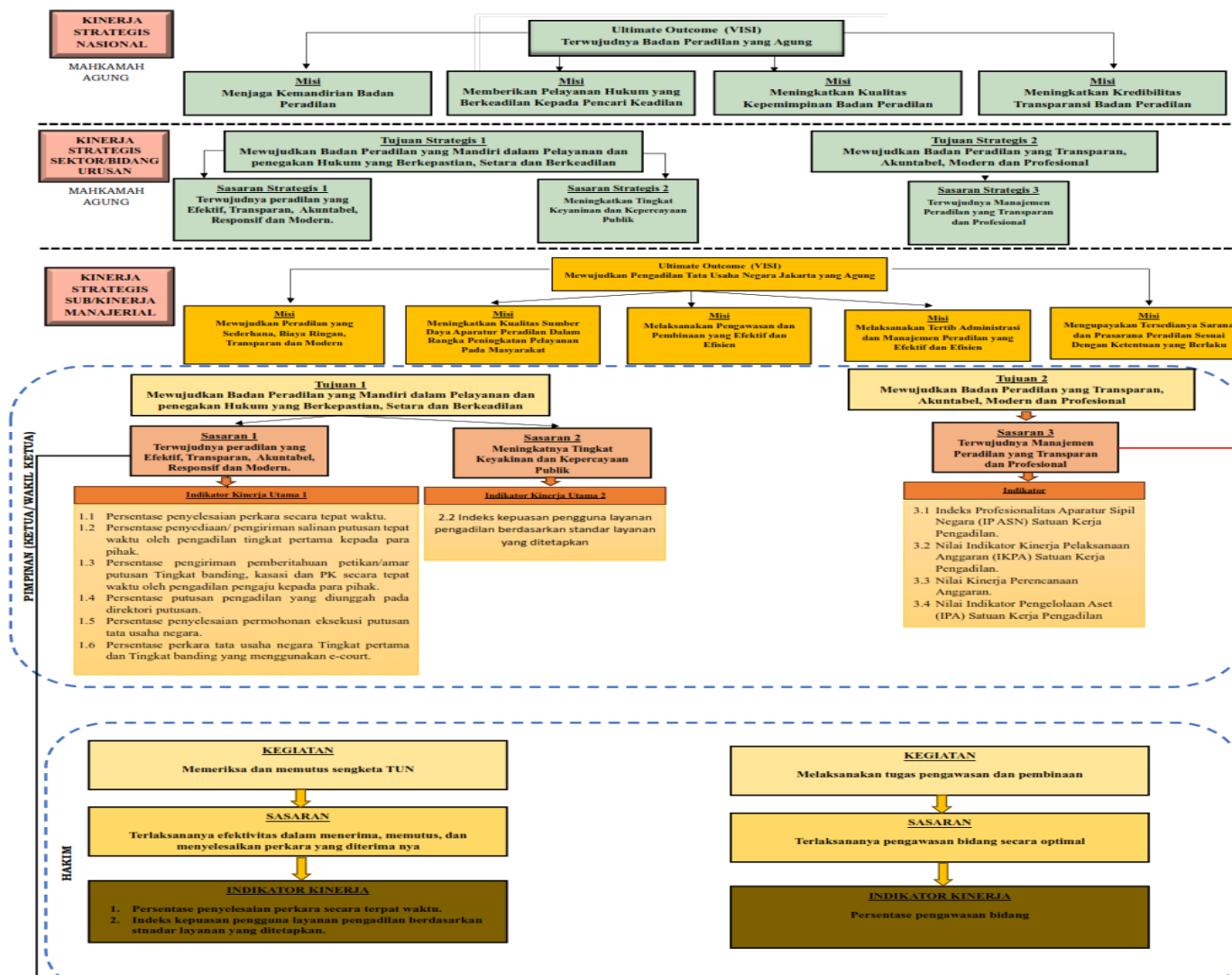
Pada sub ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja.

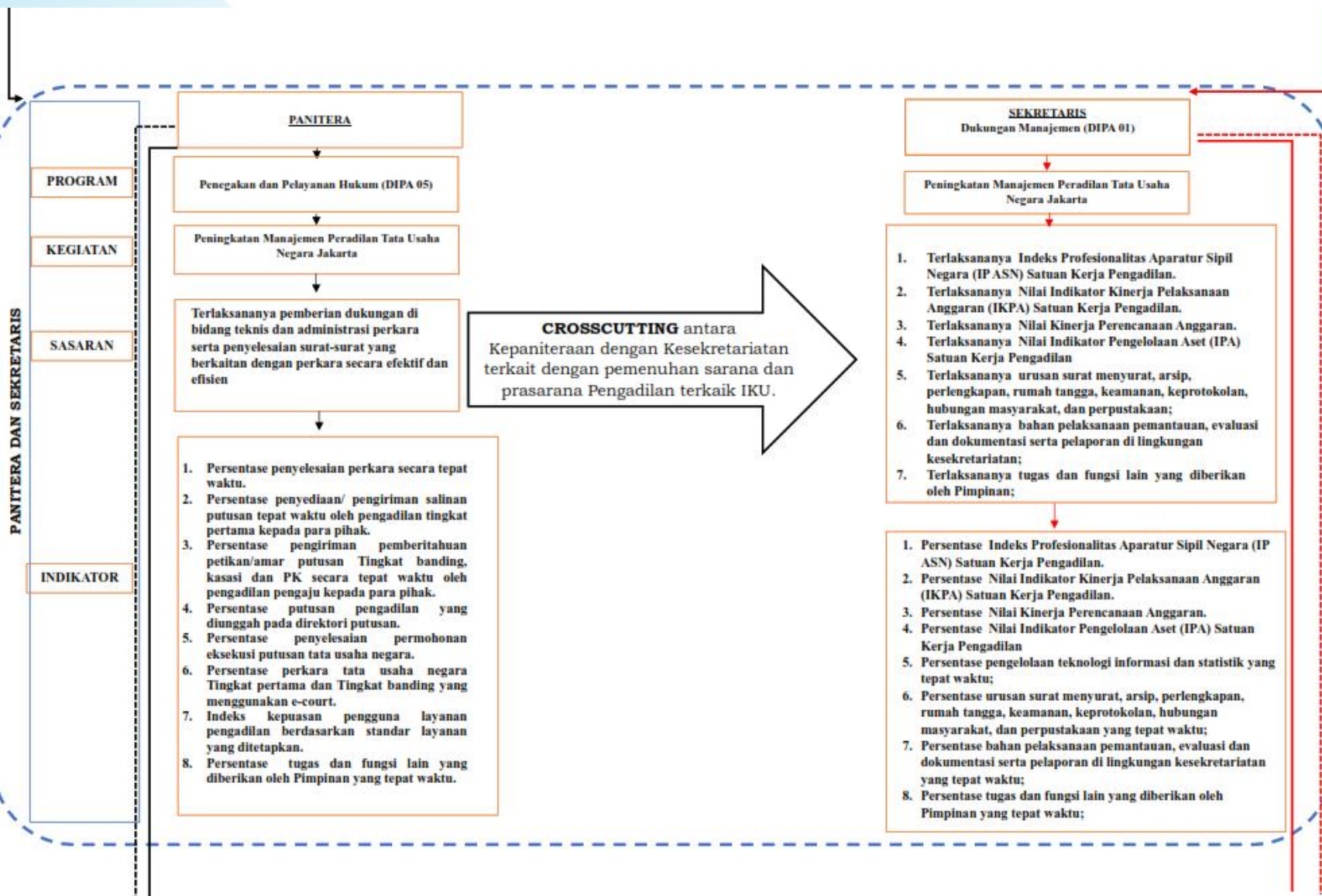
BAB IV Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Lampiran Formulir Reviu Laporan Kinerja Tahun 2025 PTUN Jakarta, Penghargaan Satker Tahun 2025, SK Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, Matriks Rencana Strategis Tahun 2025-2029 PTUN Jakarta, Revisi Rencana Aksi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Aksi Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Rencana Kinerja Tahun 2025, Reviu Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2026, Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024.

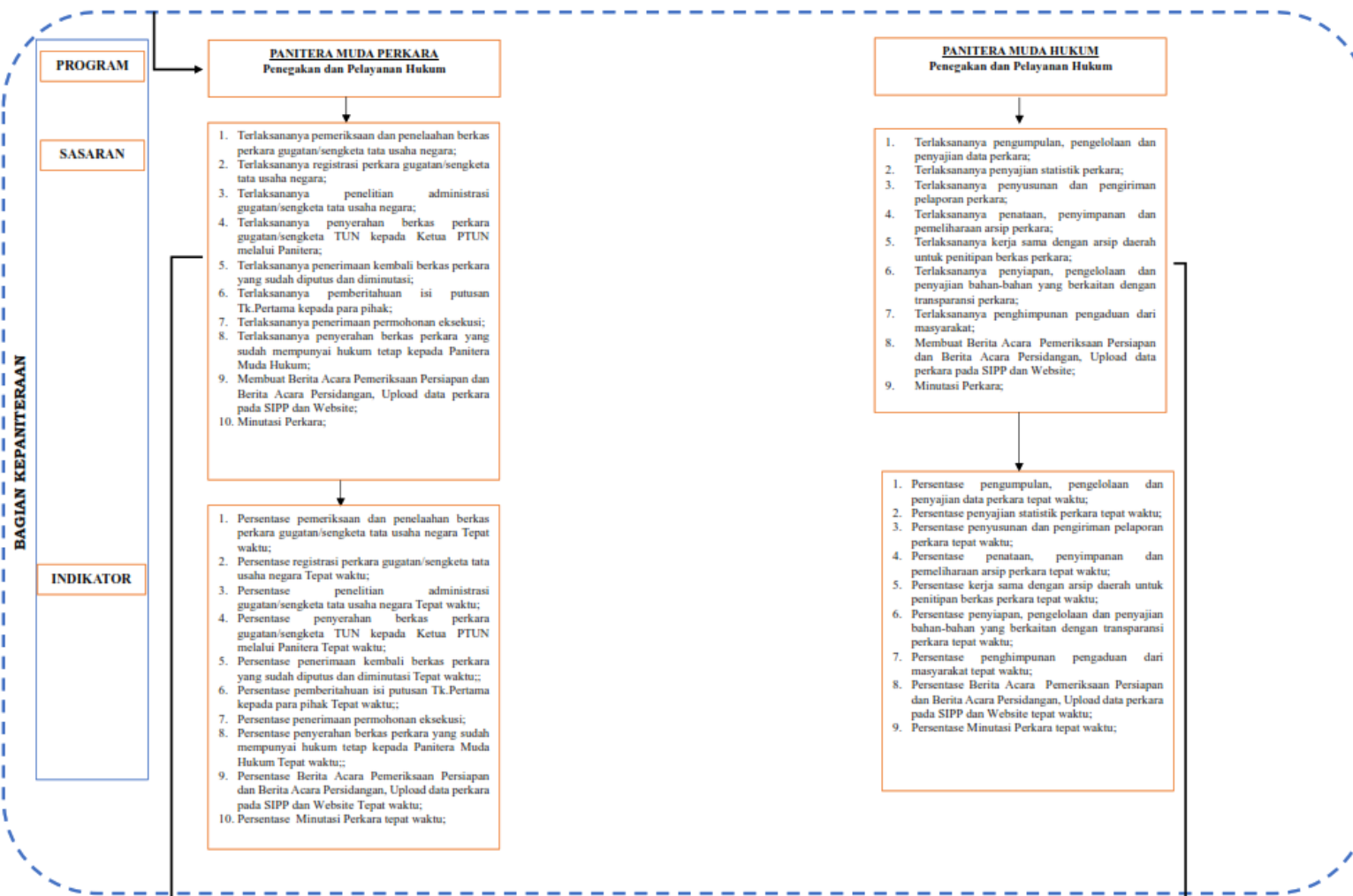


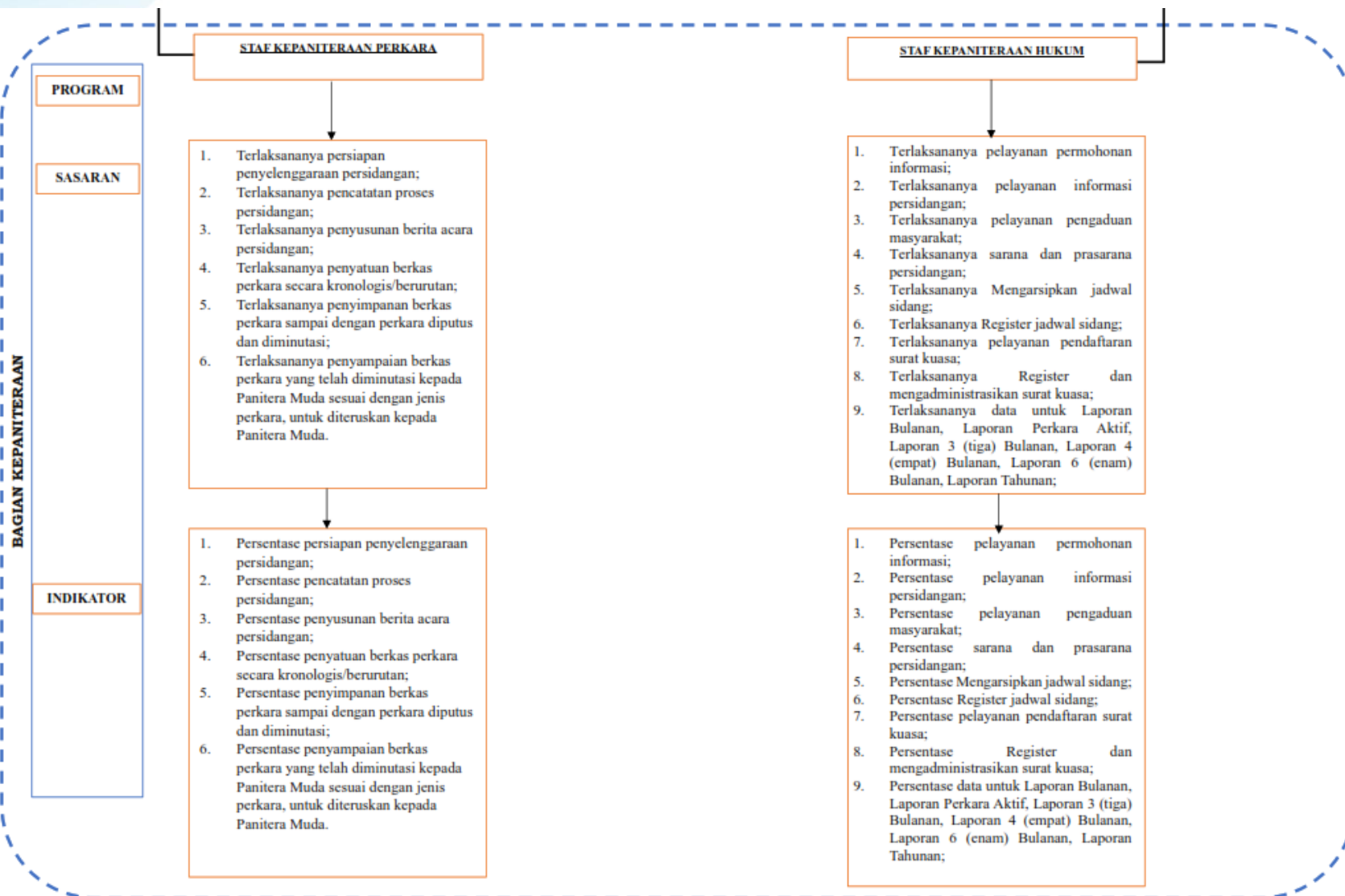
POHON KINERJA CASCADING AKUNTABILITAS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

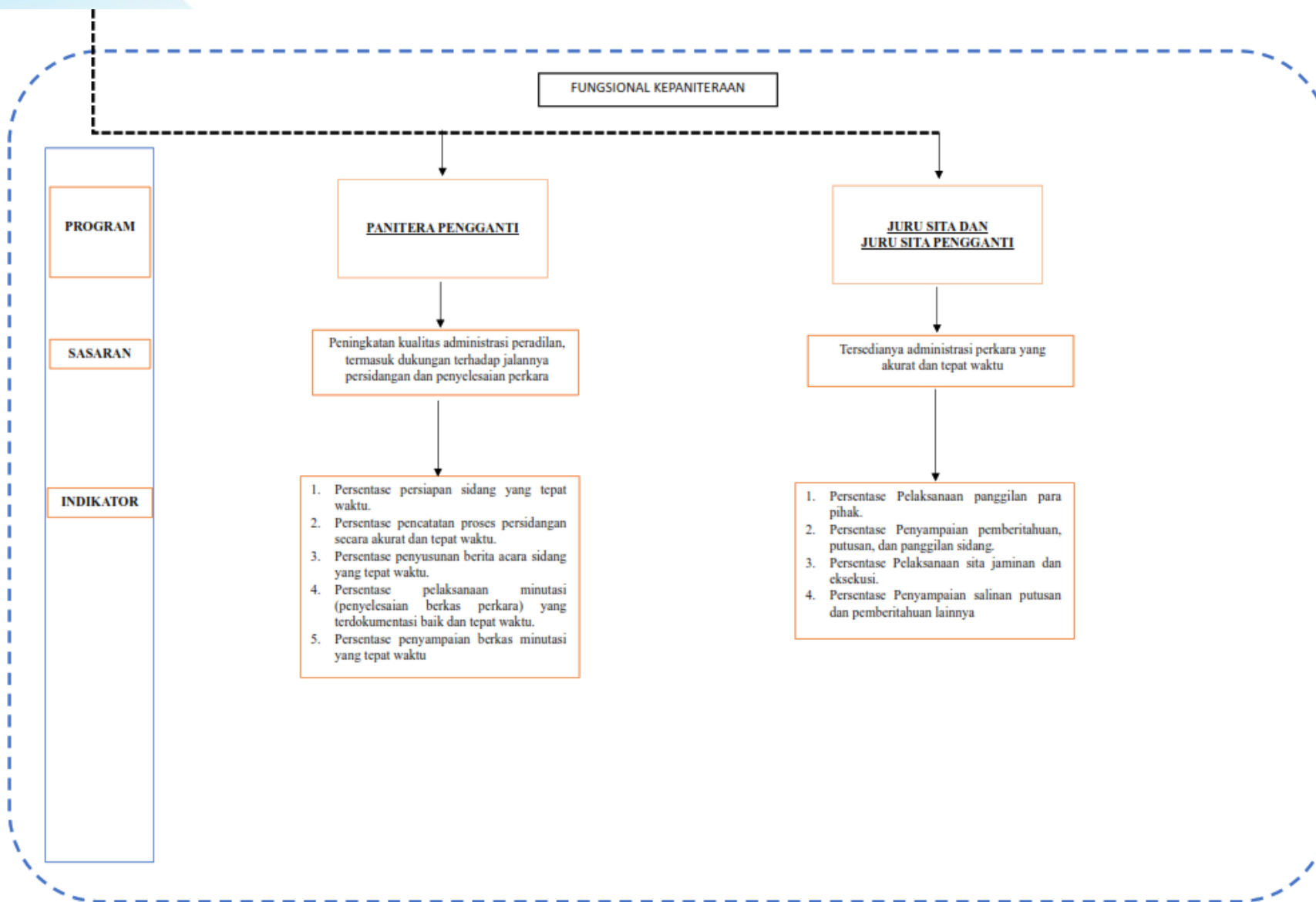


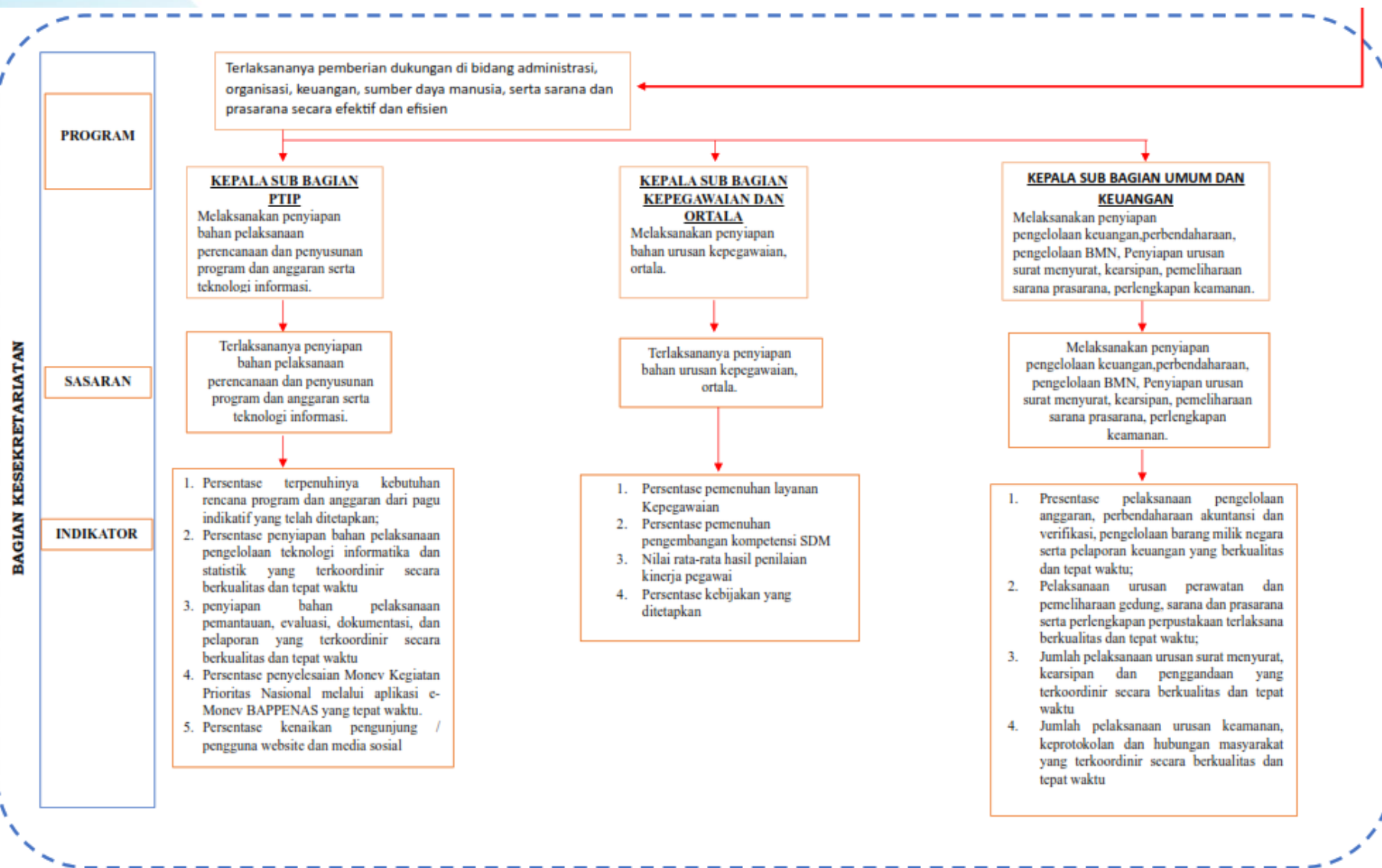


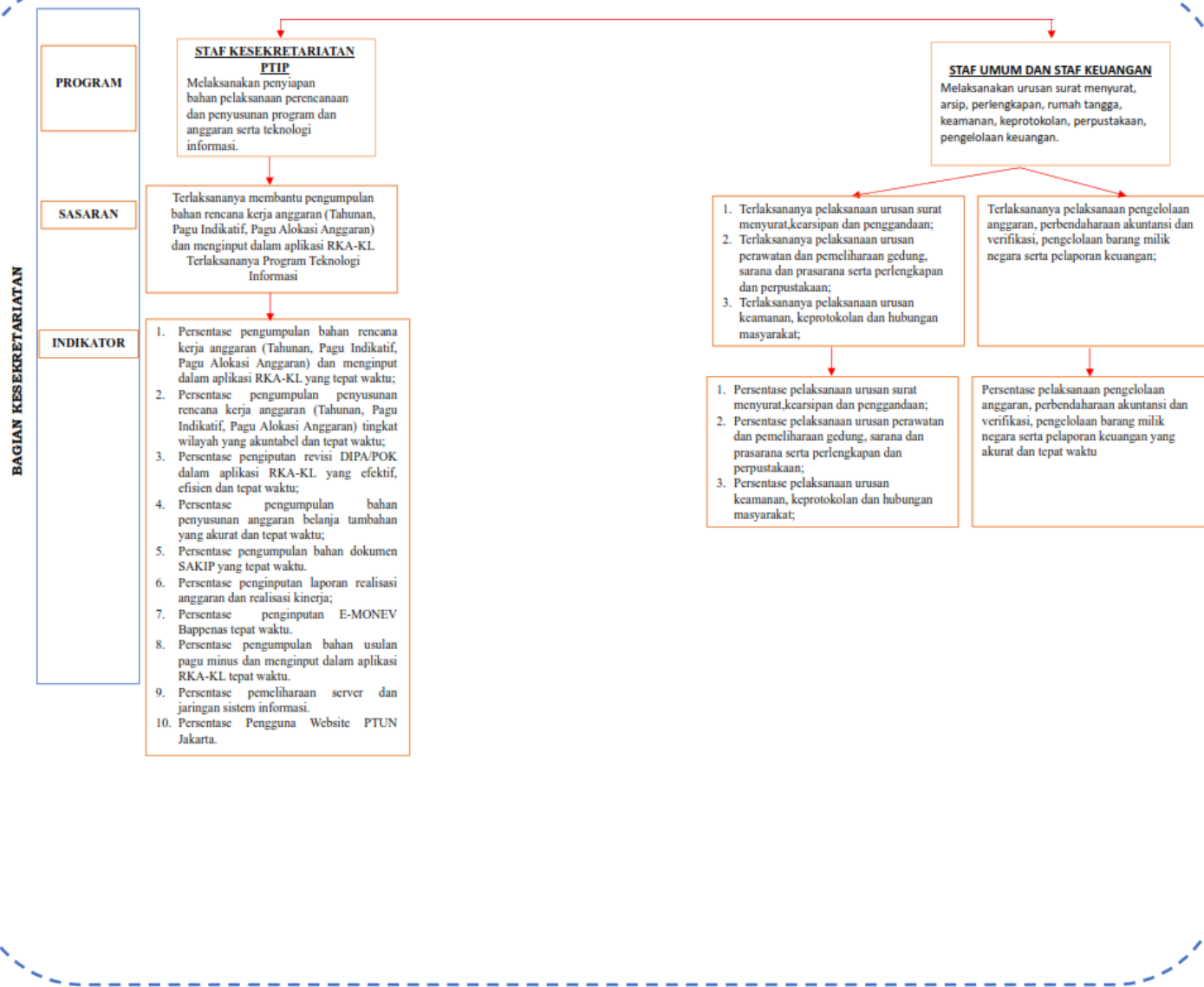
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TAHUN 2025

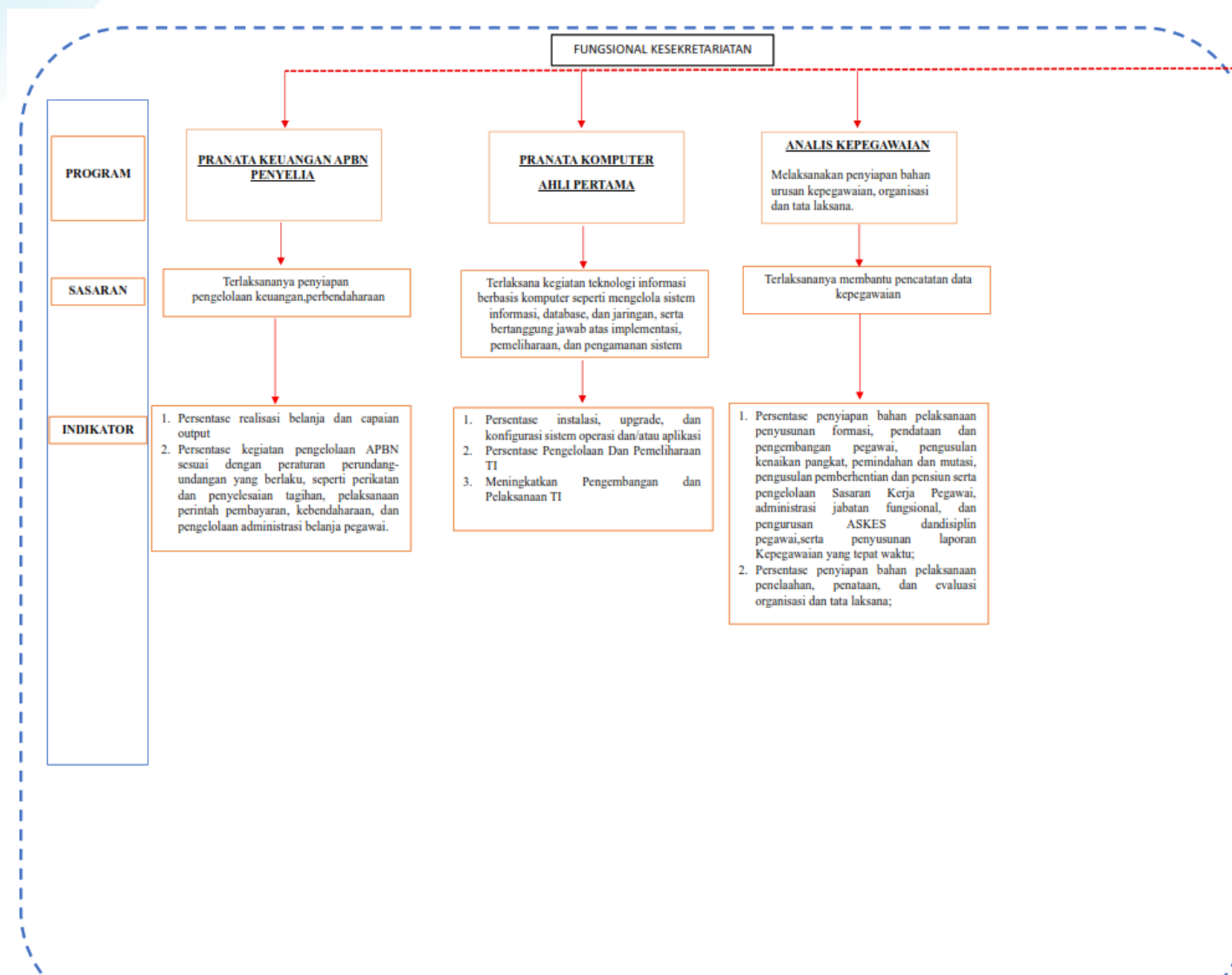












Gambar 1. 2. Pohon Kinerja PTUN Jakarta



Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025 - 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : **“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan
3. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 2710/SEK/SK.RAI.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman strategis dalam penguatan manajemen kinerja peradilan yang modern, terukur dan akuntabel. Kebijakan ini membawa penyesuaian signifikan terhadap arah, sasaran, serta indikator kinerja pengadilan guna mendukung pencapaian reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan peradilan secara berkelanjutan.

Menindaklanjuti perubahan kebijakan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penyesuaian dan penyelarasan tujuan serta Indikator Kinerja Utama secara komprehensif, dengan memperhatikan karakteristik satuan kerja, beban perkara, kebutuhan pencari keadilan, serta capaian kinerja periode sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan memastikan bahwa seluruh tujuan pengadilan selaras dengan IKU Mahkamah Agung serta mampu menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang Berkepastian Setara dan Berkeadilan; dan
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sebagai lembaga yudikatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi berkewajiban menjabarkan sasaran strategisnya selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil secara sistematis, berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kemungkinan kendala yang akan dihadapi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Rencana Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya kekuatan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengatasi kelemahan yang telah teridentifikasi.

Adapun Kekuatan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta antara lain :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Mempunyai Visi dan Misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah Agung .
2. Adanya Undang-Undang yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), *Job description*, dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015.
4. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5. Adanya dukungan dana APBN.
6. Sudah menerapkan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
7. Adanya Optimalisasi Penggunaan TI.

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Internal Pengadilan.
- Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja.
- Bidang kesekretariatan dan keperkaraan masih ada yang tugas rangkap.
- Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan.

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kurangnya jumlah mesin Scanner, Printer, dan PC komputer yang sudah tidak layak pakai.

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Adanya aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan TUN Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP TUN)
- Kerja sama dengan pihak bank berkaitan dengan biaya Panjar Perkara
- Adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Penggunaan *e-Court* dalam Proses Berperkara
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Diklat di tempat kerja.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan se-Daerah Khusus Jakarta

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa jaringan internet, website yang lebih baik.

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan.

Luasnya wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* sebagai salah satu cara untuk memacu kinerja aparat peradilan yang langsung diterapkan oleh satker bersangkutan.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan Khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan :

1. Akuntabilitas
2. Transparansi dan Kinerja

Kedua sasaran tersebut merupakan perwujudan nyata atas komitmen sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, sehingga mampu menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Untuk tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyusun dan menetapkan perjanjian kinerja sebagaimana juga yang pernah direncanakan tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 dan juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang telah disusun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :	32 %
		- Banding	27 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		- Kasasi	
		c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu	65 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60 %
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	67 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50 %

No.	Program	Anggaran
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15.896.553.000,-
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 81.750.000,-

Tabel 2. 1 Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk lebih jelas dan rinci tentang perjanjian kinerja tahun 2025, maka akan kami coba jelaskan secara detail sebagaimana tentang di bawah ini.

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, Dan Akuntabel

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator kinerja adalah persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- b. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi. Pada indikator kinerja ini Pengadilan Tata Usaha berusaha mengambil keputusan secara adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan upaya hukum lainnya dengan tingkat keberhasilan Persentase Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara;
- c. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dengan indikator indeks kepuasan masyarakat setiap tahun semakin meningkat.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Salinan putusan yang dikirim kepada pihak tepat waktu, dengan indikator kinerja adalah meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan serta penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk di dalamnya penyelesaian minutasi;

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupaya untuk melakukan dan mencapai penetapan kinerja dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin (berperkara secara cuma-cuma) dengan menggunakan anggaran yang tersedia di DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Pos Pelayanan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 dengan menggunakan anggaran yang tersedia untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam hal pembuatan gugatan, jawaban serta advis terhadap perkara yang dihadapinya.

4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupaya melakukan dan mengambil arah kebijakan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti pihak Kantor Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta, pihak keamanan, juga pihak pemerintah Kota Jakarta dimana objek eksekusi akan dilaksanakan.

C. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Tata Usaha Negara Jakarta adalah

1. Penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, meliputi:
 - Memberikan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 - Penyelesaian berkas perkara.
 - Penyelesaian Sisa Perkara.
2. Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Eksekusi yang lengkap dan tepat waktu.
3. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
4. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
5. Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan dukungan manajemen pengadilan (non operasional perkantoran).
2. Layanan perkantoran, meliputi :
 - Pembayaran gaji dan tunjangan.
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
 - Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

- Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di lingkungan Mahkamah Agung. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Perangkat pengolah data dan komunikasi, meliputi:
 - Sarana dan prasarana percepatan penyelesaian perkara (pengolah data dan komunikasi).
 - Sarana dan prasarana kesekretariatan (pengolah data dan komunikasi)
2. Peralatan dan fasilitas perkantoran, meliputi : peralatan dan fasilitas perkantoran.
3. Gedung/bangunan, meliputi: gedung dan bangunan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, data realisasi dan capaian kinerja selama periode Januari sampai dengan September Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif, terukur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada periode tersebut secara umum berjalan selaras dengan target yang ditetapkan, dengan sebagian indikator mencapai bahkan melampaui sasaran kinerja. Kondisi ini mencerminkan efektivitas perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta komitmen seluruh unit kerja dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal. Adapun rincian realisasi dan capaian kinerja dimaksud selanjutnya dapat kami sajikan dalam matriks berikut ini:

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				TW I-TW III	Capaian Tahun 2025
1	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	78,28%	97,85%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		– Banding	32%	52,01%	162,53%
		– Kasasi	27%	65,14%	241,26%
		Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%	96,27%	148,10%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65%	100%	153,84%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	100%	166,67%
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum	67%	100%	149,23%

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				TW I-TW III Tahun 2025	Capaian
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50	47,62	95,24

Tabel 2. 2. Tabel Realisasi dan Capaian Triwulan I-III Tahun 2025

a. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

- Sisa Perkara Tahun 2024 = 154 Perkara
- Perkara Masuk Tahun 2025 = 449 Perkara
- Perkara Masuk TW I – TW 3 Tahun 2025 = 330 Perkara
- Perkara Putus Tepat Waktu Tahun 2025 = 391 Perkara
- Perkara Putus Tepat Waktu TW 1- III 2025 = 292 Perkara
- Perkara Putus Tahun 2025 = 492 Perkara
- Perkara Putus TW I – III Th. 2025 = 373 Perkara
- Sisa Perkara Tahun 2025 = 117 Perkara

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{292}{373} \times 100\% = 78,28 \%$$

$$\text{Capaian} = \frac{78,28}{80} \times 100\% = 97,85 \%$$

Catatan :

- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
 - Perkara yang di selesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk. Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.
- b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

- **Banding**

Perkara Putus Tahun 2025	= 492 Perkara
Perkara Putus TW I – III Th 2025	= 373 Perkara
Perkara Banding Tahun 2025	= 267 Perkara
Perkara Banding TW I – III Th 2025	= 179 Perkara
Perkara Tidak Banding	= 225 Perkara
Perkara Tidak Banding TW I – III Th 2025	= 194 Perkara

$$\text{Realisasi} = \frac{194}{373} \times 100\% = 52,01\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{52,01}{32} \times 100\% = 162,53 \%$$

- **Kasasi**

Perkara Putus Banding Tahun 2025	= 492 Perkara
Perkara Putus Banding TW I -III 2025	= 373 Perkara
Perkara Kasasi Tahun 2025	= 199 Perkara
Perkara Kasasi TW I – III 2025	= 119 Perkara
Perkara Tidak Kasasi Tahun 2025	= 293 Perkara
Perkara Tidak Kasasi TW I -III 2025	= 243 Perkara

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{243}{373} \times 100\% = 65,14\%$$

$$Capaian = \frac{65,14}{27} \times 100\% = 241,26 \%$$

- c. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :

- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80 .

Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan Peradilan Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala per triwulan terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan.

Hasil Indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Triwulan I – III Pada Tahun 2025 adalah **3,85** yang dikonversi menjadi **96,27** angka ini berada di atas ketentuan minimal yang telah ditentukan di dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 yaitu 62,51 sehingga dapat disimpulkan masyarakat para pencari keadilan puas terhadap kinerja pelayanan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

$$Capaian = \frac{96,27}{65} \times 100\% = 148,10 \%$$

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,98	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,9	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,88	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3,9	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,85	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,86	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,78	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,89	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3,97	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,85	Sangat Baik

Tabel 2. 3 Tabel Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Triwulan I – III

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Persentase salinan Putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{373}{373} \times 100\% = 100\%$$

$$Capaian = \frac{100}{65} \times 100\% = 153,84$$

Catatan :

- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan
- Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah di putus dan diminutasi pada tahun berjalan

2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$Realisasi TW I - TW III 2025 = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

$$Capaian TW I - TW III 2025 = \frac{100}{67} \times 100\% = 149,23\%$$

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi TW I – TW III 2025} = \frac{169}{169} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian TW I – TW III 2025} = \frac{100}{60} \times 100\% = 166,67$$

3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi TW I – TW III 2025} = \frac{10}{21} \times 100\% = 47,62\%$$

$$\text{Capaian TW I – TW III 2025} = \frac{47,62}{50} \times 100\% = 95,24\%$$

Catatan :

- BHT = berkekuatan hukum tetap.
- Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak / dilaksanakan oleh tergugat
- Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.
-

Matriks Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Tahun 2025

No.	Perkara	Sisa Tahun lalu Tahun 2024	Masuk Tahun 2025	Putus	Sisa Perkara Tahun 2025
1.	Gugatan Tk. I	154	454	491	117
2.	Permohonan	0	0	0	0
3.	Banding	60	240	228	72
4.	Kasasi	344	199	309	234
5.	PK	25	141	65	90
6.	Eksekusi	0	31	18	13

Tabel 2. 4. Tabel Matriks Keadaan Perkara Tahun 2025

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2710/SEK/SK.RAI.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tahun 2025-2029 sebagai landasan penguatan manajemen kinerja peradilan yang modern dan akuntabel. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penyesuaian dan penyelarasan IKU dilanjutkan Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai berikut

Reviu Perjanjian Kinerja 2025

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan,	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%
		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	akuntabel, responsif, dan modern.	tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	
		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%
		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%
		Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3.70
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Yang Transparan dan Profesional	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%
		Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	85%
		Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3.0

No.	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 18.349.960.000,-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 222.190.000,-
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 63.250.000,-

Tabel 2. 5. Tabel Reviu Perjanjian Kinerja 2025



Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam subbab ini, disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi, sejalan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk tahun 2025, target, realisasi, dan capaian masing-masing indikator kinerja dari bulan Januari sampai dengan September 2025 dapat terlihat dalam tabel berikut

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				TW I – TW III	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	78,28	97,85
		b. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum			
		Banding	32	52,01	162,53
		Kasasi	27	65,14	241,26
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	65	96,27	148,10

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				TW I – TW III	CAPAIAN
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	65	100	153,84
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	60	100	166,67
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	67	100	149,23
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	80	78,28	97,85

Tabel 3. 1. Tabel Capaian Indikator Kinerja Triwulan I - III

Pada Triwulan IV Tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 2710/SEK/SK.RAI.3/X/2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tahun 2025-2029, sebagai landasan penguatan manajemen kinerja peradilan yang modern, terukur, dan akuntabel. Kebijakan ini

menjadi acuan strategis dalam penyelarasan arah kinerja pengadilan di seluruh lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan penyesuaian dan penyelarasan Indikator Kinerja utama (IKU) secara komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik satuan kerja, kapasitas sumber daya, serta capaian kinerja pada periode sebelumnya. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan keterkaitan yang selaras antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap bulan mulai Januari hingga Desember 2025, berdasarkan sasaran, indikator, dan target yang tertuang dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil Pengukuran tersebut menjadi dasar evaluasi capaian kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, serta perumusan Langkah perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan.

Laporan Capaian Kinerja Per Bulan Tahun 2025

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Per Bulan %											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	1.1 Persentase Penyelesaian Perkara Secara tepat waktu	70	126,06	129,57	122,93	92,86	110,6	110,6	80,51	114,84	126,99	109,63	129,47	120,13
		1.2 Persentase Penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	85	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar	85	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65

No	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Per Bulan %											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.													
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
		1.5. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	35	-	-	285,71	-	-	-	95,23	142,86	714,29	857,14	57,14	285,71

No	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Per Bulan %											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court	98	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04	102,04
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	90	-	107,7	-	-	-	-	-	106,97	-	-	-	105,97
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang	3.1 Indeks profesionalitas aparatur sipil negara	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,11

No	Sasaran / Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Per Bulan %											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
	Transparan dan Profesional	(IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.													
		3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.													
		DIPA 01	90	100,31	111,11	101,39	99,54	98,84	96,56	96,36	104,68	103,33	102,1	101,11	102,1
		DIPA 05	90	97,22	103,01	98,96	88,5	89,42	95,11	91,49	89,48	88,3	93,03	93,37	95,47
		3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran													

No	Sasaran Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian Per Bulan %											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
		DIPA 01	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,88
		DIPA 05	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,47
		3.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109

Tabel 3. 2. Tabel Laporan Capaian Kinerja Per Bulan Tahun 2025

Sumber Data : Laporan Bulanan dari Aplikasi Batara MA

Sehingga target, realisasi, dan capaian masing-masing indikator kinerja untuk tahun 2025 dapat terlihat dalam tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%	79,47%	113,53%
		b. Persentase penyediaan /pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	100%	117,65%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%	100%	117,65%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	100%	125%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	35%	58,06%	165,89%
		f. Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court	98%	100%	102,04%
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,70	3,85	104,05%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	a. Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%	78,08%	104,11%
		b. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%	91,89%	102,1%
			90%	85,92%	95,47%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		c. Nilai kerja Perencanaan Anggaran	85%	95,95%	112,88%
			85%	87,95%	103,47%
		d. Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3	3,27	109%

Tabel 3. 3. Tabel Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025

Sumber Data : N/A

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan sebagaimana diterapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam mengukur capaian organisasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

1. Analisis Capaian Kinerja, Keberhasilan, dan Perbandingan dengan beberapa tahun terakhir

Sesuai dengan Reviu Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025, sasaran strategis yang telah dicapai sampai dengan akhir Desember 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Indikator Kinerja 1.1.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	70 %	79,47%	113,53%

Tabel 3. 4. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu

Sumber Data : Laporan Bulanan Data Perkara

• Formula

Realisasi Indikator kinerja persentase penyelesaian perkara tidak melebihi 5 (lima) bulan (tepat waktu) dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang ada tahun berjalan}} \times 100\%$$

• Analisis Capaian

Pada Tahun 2025 jumlah perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebanyak 608 perkara, yang terdiri dari sisa perkara tahun 2024 sebanyak 154 perkara, dan perkara yang diterima tahun

2025 sebanyak 449 Perkara. Dari 603 perkara tersebut, yang diputus sebanyak 492. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu atau kurang dari 5 bulan sejumlah 391 Perkara. Perhitungan realisasi atas indikator kinerja ini Adalah sebagai berikut :

$$Realisasi = \frac{391}{492} \times 100\% = 79,47 \%$$

Pada Tahun 2025, indikator ini ditargetkan dapat terealisasi sebesar 70 %, sehingga capaian indikator sebagai berikut

$$Capaian = \frac{79,47}{70} \times 100\% = 113,53 \%$$

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun ini persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, antara lain:

- a. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi SIPP**

Dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara maksimal, pekerjaan administrasi dapat dilakukan lebih efisien, sehingga proses pengelolaan perkara menjadi lebih terorganisir dan transparan.

- b. Pengelolaan Kualitas SDM**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis seperti Bimtek, evaluasi berkala, Upaya ini bertujuan untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kinerja aparatur, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien dan berorientasi pada kepuasan Masyarakat. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dalam mendukung visi Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern, akuntabel, dan berkeadilan.

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya**

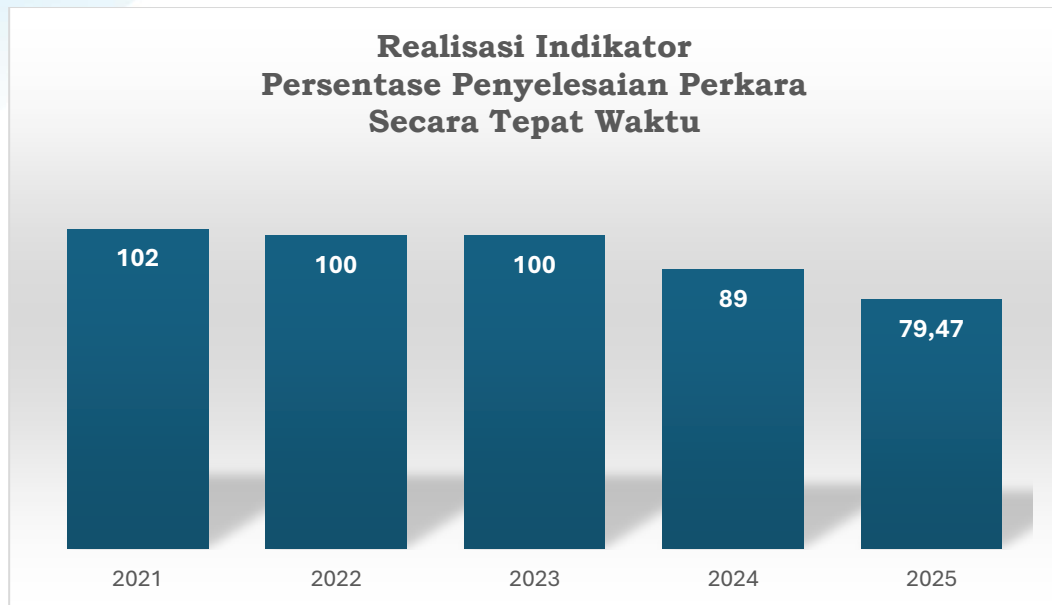
Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami, tampilkan data penyelesaian perkara dari tahun 2021 hingga 2025.

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Perkara diputus	394	572	840	524	492
Perkara diputus ≤ 5 bulan	386	572	840	467	391
Realisasi (%)	102	100	100	89	79,47
Target (%)	100	100	100	80	70
Capaian (%)	102	100	100	111	109,97

Tabel 3. 5. Tabel Data Penyelesaian Perkara dari Tahun 2021 – 2025

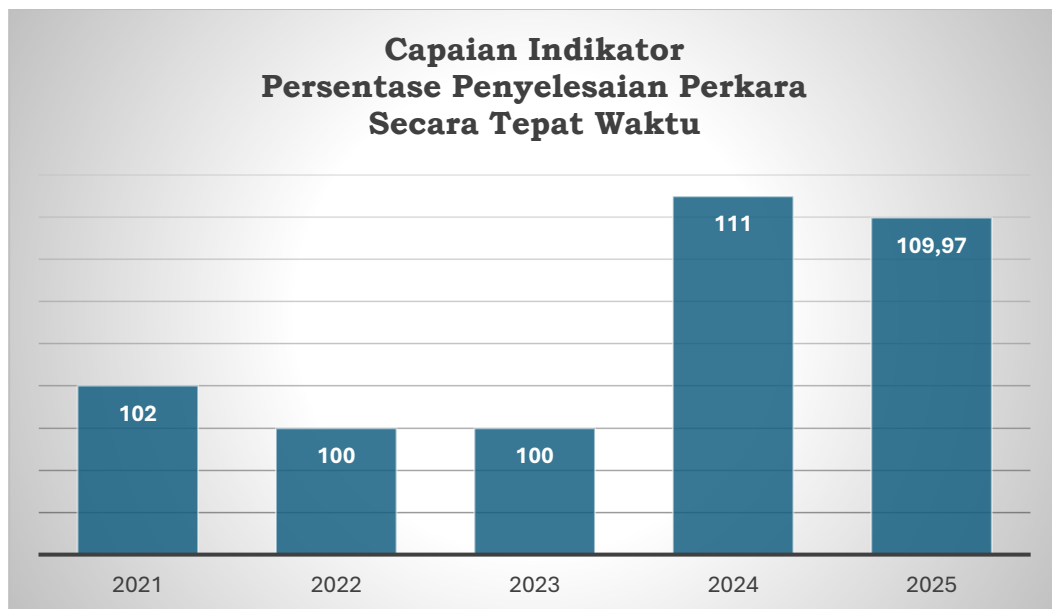
Sumber Data : Laporan Bulanan Data Perkara

Realisasi persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada bagan berikut



Gambar 3. 1. Bagan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.1.

Sedangkan untuk capaian dari tahun 2021 hingga tahun 2025, dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 3. 2. Bagan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.1.

Jika ditinjau dari realisasi selama empat tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga 2025, terdapat tren fluktuatif dalam pencapaian kinerja. Namun capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan penurunan sekitar 1,03% dibandingkan dengan tahun 2024.

Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penurunan target kinerja yang lebih rendah 10% dibanding tahun 2024. Sebagai contoh, target presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 80%, sedangkan pada Tahun 2025 adalah sebesar 70%. Kondisi ini disebabkan oleh penyesuaian target kinerja.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	PTUN Jakarta	70	79,47	113,53
		PTUN Bandung	75	77,65	103,53
		PTUN Jambi	83	91,67	110,45

Tabel 3. 6. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.1. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan data capaian indikator kinerja utama berupa persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu, seluruh satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan, sehingga sasaran terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern dapat dikatakan tercapai dengan sangat baik. PTUN Jakarta menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja 1.2.	Target	Realiasi	Capaian
Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan	85 %	100%	117,65%

Tingkat pertama kepada para pihak			
--	--	--	--

Tabel 3. 7 Tabel Capaian Indikator Kinerja Presentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak

- **Formula**

Indikator Kinerja Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

- **Analisis Capaian**

Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyelesaikan perkara sebanyak 492 Perkara. Dari total penyelesaian perkara tersebut, jumlah penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak terdapat 492 perkara. Perhitungan realisasi atas indikator kinerja ini Adalah sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{492}{492} \times 100\% = 100 \%$$

Sedangkan pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan target sebesar **100 %**, sehingga perhitungan capaian indikator ini Adalah

$$\text{Capaian} = \frac{100}{85} \times 100\% = 117,65 \%$$

Dari hasil tersebut, terlihat capaian dari indikator kinerja penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak sesuai target yang ditetapkan yakni **117,65%**.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak pada tahun 2025 yang mencapai **100%**, didukung oleh langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai berikut :

- a. Pengendalian Waktu Minutasi Putusan**

Dilakukan pengendalian penyelesaian minutasi putusan agar dilaksanakan segera setelah putusan diucapkan, sehingga penyediaan salinan putusan dapat dilakukan tepat waktu

- b. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara Konsisten.**

Pelaksanaan penyediaan dan pengiriman Salinan putusan dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku, guna menjamin ketepatan waktu dan tertib administrasi perkara

- c. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)**

Pemanfaatan aplikasi SIPP dilakukan secara optimal sebagai sarana monitoring status minutasi dan distribusi Salinan putusan secara berkelanjutan

- d. Penguatan Koordinasi Internal Aparatur**

Dilakukan penguatan koordinasi antara Majelis Hakim dan Kepaniteraan dalam rangka mempercepat penyelesaian administrasi perkara

- e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kinerja**

Pimpinan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan dan pengiriman Salinan putusan untuk memastikan pelaksanaan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya**

Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami tampilkan data penyelesaian perkara dari tahun 2021 hingga 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Perkara diputus	300	403	511	524	492
Salinan Putusan yang tersedia /dikirimkan kepada para pihak Secara tepat waktu	300	403	511	524	492
Realisasi (%)	100	100	100	100	100
Target (%)	100	100	100	65	85
Capaian (%)	100	100	100	153	117,65

Tabel 3. 8. Tabel Capaian Data Penyelesaian Perkara dari Tahun 2021 – 2025

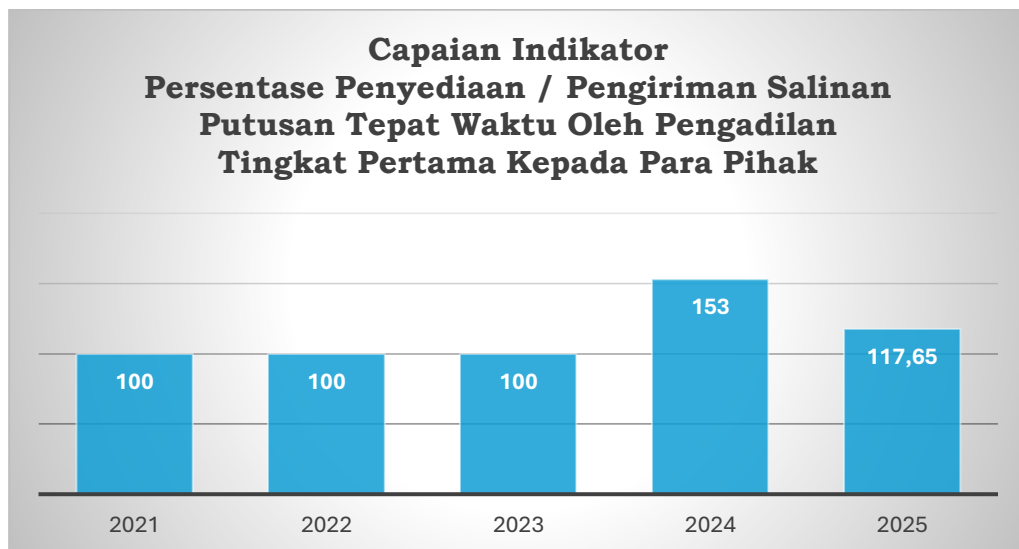
Sumber Data : Laporan Bulanan Data Perkara

Realisasi presentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak dari tahun 2021 dapat dilihat pada bagan berikut :



**Gambar 3. 3. Bagan Realisasi Indikator Kinerja
Utama Sasaran Strategis 1.2.**

Sedangkan untuk capaian dari tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada bagan berikut :



**Gambar 3. 4. Bagan Capaian Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis 1.2.**

Secara keseluruhan, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 32 perkara dan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan penyediaan serta pengiriman salinan

putusan secara tepat waktu. Namun demikian, apabila dilihat dari data realisasi kinerja tahun 2025, persentase capaian terlihat mengalami penurunan. Hal ini bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja, melainkan sebagai konsekuensi dari peningkatan target kinerja yang ditetapkan menjadi 85 % dari sebelumnya 65%.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian
	Kinerja Utama				
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	PTUN Jakarta	85 %	100%	117,65%
		PTUN Bandung	100%	100%	100%
		PTUN Jambi	100%	100%	100%

Tabel 3. 9. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.2 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak, seluruh satuan kerja telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan. PTUN Jakarta menetapkan target 85%, dengan realisasi 100% dan capaian 117,65%, sehingga kinerjanya melampaui standar nasional dan menunjukkan tingkat ketepatan waktu yang sangat optimal dalam pelayanan penyampaian salinan putusan. Hal ini mencerminkan

kualitas pelayanan administrasi perkara yang semakin efektif, tepat waktu, dan berorientasi pada kepastian layanan kepada para pihak.

Indikator Kinerja 1.3.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan Tingkat banding, Kasasi dan PK Secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	85%	100%	117,65%

Tabel 3. 10. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak

- **Formula**

Indikator Kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

- **Analisis Capaian**

Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil menyelesaikan sebanyak **594** perkara. Seluruh perkara tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan **100%** perkara yang ditangani Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tahun 2025 telah memperoleh pelayanan persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat

waktu, sebagai wujud komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan pelayanan peradilan yang akuntabel.

Pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan kinerja yang optimal dalam penyelesaian administrasi perkara lanjutan. Dari total **594** perkara yang telah diselesaikan seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Capaian ini menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara di Tingkat pertama, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak para pihak atas informasi putusan pada seluruh tahapan proses peradilan. Dengan terealisasinya pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan secara tepat waktu terhadap **100%** perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah berhasil memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi peradilan.

Keberhasilan tersebut mencerminkan konsistensi penerapan tata kelola perkara yang tertib, efektif, dan berorientasi pada pelayanan sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Realisasi indikator presentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan pk secara tepat waktu :

$$Realisasi = \frac{594}{594} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menetapkan target sebesar **85%**, sehingga capaian indikator ini Adalah sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{100}{85} \times 100\% = 117,65 \%$$

Capaian indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak mencapai **117,65%** atau sesuai target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut didukung oleh Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, antara lain :

- a. Pengendalian Administrasi Perkara Lanjutan**

Dilakukan pengendalian secara berkelanjutan terhadap administrasi perkara tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali untuk memastikan setiap putusan ditindaklanjuti dengan pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan secara tepat waktu

- b. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Secara Konsisten**

Seluruh proses penyampaian pemberitahuan petikan/amar putusan dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku guna menjamin ketertiban administrasi dan ketepatan waktu layanan.

- c. Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi SIPP**

Pemanfaatan SIPP dilakukan secara optimal sebagai sarana pencatatan, pemantauan, dan pengendalian status perkara lanjutan secara real time.

- d. Penguatan Kordinasi Antar Pegawai**

Koordinasi yang efektif antara Majelis Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan petugas kepaniteraan dilakukan

untuk mempercepat penyelesaian administrasi dan pengiriman pemberitahuan kepada para pihak.

e. Monitoring dan Evaluasi Oleh Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberitahuan petikan/amar putusan sebagai Upaya menjaga konsistensi capaian kinerja.

Melalui Langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil menjaga kualitas layanan administrasi perkara lanjutan secara cepat, tepat dan akuntabel serta memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap instansi peradilan.

• Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya

Untuk indikator kinerja Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putuan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. Pada tahun 2025, belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja dengan periode empat tahun sebelumnya atau dalam rentang lima tahun terakhir seluruhnya. Karena sebelumnya indikator kinerja pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat Banding dan Kasasi diukur secara terpisah, sedangkan indikator pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Peninjauan Kembali (PK) baru mulai ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025. Sehingga belum tersedia data historis yang memadai sebagai dasar evaluasi komparatif antarperiode. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 menjadi titik awal (baseline) dalam pengukuran dan pemantauan kinerja indikator dimaksud pada tahun-tahun selanjutnya.

Dilihat dari data realisasi maupun capaian tahun 2025, terdapat peningkatan jumlah pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan capaian pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu pada tahun 2025 merupakan hasil dari keberhasilan Program Peningkatan Manajemen Perkara dan Administrasi Peradilan yang dilaksanakan secara konsisten oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketertiban administrasi perkara lanjutan, mempercepat alur pelayanan, serta menjamin pemenuhan hak para pihak atas informasi putusan secara tepat waktu.

Keberhasilan program tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan SIPP sebagai sarana pengendalian dan monitoring perkara lanjutan, penguatan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepaniteraan, serta peningkatan koordinasi antar aparaturnya dalam penanganan administrasi Banding, Kasasi, PK. selain itu, monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan turut berperan dalam menjaga konsistensi capaian dari tahun ke tahun.

Dengan demikian, peningkatan kinerja pada indikator ini mencerminkan efektifitas pelaksanaan program peningkatan manajemen perkara yang berorientasi pada pelayanan prima. Kepastian hukum, dan akuntabilitas sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan peradilan yang modern dan berkeadilan.



- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan Tingkat banding, Kasasi dan PK Secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	PTUN Jakarta	85 %	100%	117,65%
		PTUN Bandung	100%	100%	100%
		PTUN Jambi	100%	100%	100%

Tabel 3. 11. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.3 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak, seluruh satuan kerja telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan secara nasional. PTUN Jakarta menunjukkan kinerja yang melampaui standar nasional serta mencerminkan efektivitas dan ketepatan waktu yang sangat baik dalam penyampaian pemberitahuan putusan kepada para pihak. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian pemberitahuan petikan/amar putusan pada seluruh satuan kerja telah berjalan efektif, tertib administrasi, dan tepat waktu, dengan PTUN Jakarta mencatatkan kinerja melampaui target.

Indikator Kinerja 1.4.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	80%	100%	125%

Tabel 3. 12. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan

- **Formula**

Indikator Kinerja persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

- **Analisis Capaian**

Selama Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melaksanakan pengunggahan putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini mencerminkan meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan peradilan, sekaligus menunjukkan komitmen pengadilan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik. Konsistensi pelaksanaan pengunggahan putusan tersebut terus mendukung kelancaran penyampaian putusan kepada para pihak serta memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap kualitas layanan pengadilan.

Pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan kinerja yang sangat optimal dalam pelaksanaan pengunggahan putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung secara tepat waktu. Dari total **468** perkara yang telah diminutasi, seluruh putusan perkara tersebut telah diunggah ke dalam direktori putusan, sehingga capaian indikator ini mencapai 100%.

Capaian tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara

secara substantif, tetapi juga secara konsisten memastikan terpenuhinya standar pelayanan peradilan. Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan komitmen kuat pengadilan dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi publik. Dengan terealisasinya pengungkahan putusan terhadap seluruh perkara yang diminutasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta turut mendukung kelancaran penyampaian putusan kepada para pihak serta memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan peradilan.

Realisasi indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan ditargetkan sebesar **100%** sehingga capaian indikator ini Adalah sebagai berikut

$$Realisasi = \frac{468}{468} \times 100\% = 100 \%$$

Sedangkan pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerapkan target sebesar **100%** sehingga capaian indikator ini Adalah sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{100}{80} \times 100\% = 125 \%$$

Dengan demikian capaian dari indikator penerapan putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mencapai target **125%** pengungkahan putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung selama Tahun 2025 tidak terlepas dari sinergi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kinerja yang berjalan secara efektif. Capaian ini didukung oleh Beberapa Langkah yang dilakukan antara lain :

a. Kepatuhan Terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)

Keberhasilan capaian indikator pengunggahan putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung didukung oleh meningkatnya kepatuhan aparatur terhadap Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Seluruh tahapan mulai dari minutasasi hingga publikasi putusan dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses pengunggahan.

b. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memanfaatkan sistem teknologi informasi peradilan secara optimal dalam mendukung pengelolaan dan publikasi putusan. Pemahaman teknis aparatur terhadap aplikasi pendukung Direktori Putusan turut mempercepat proses unggah putusan serta meminimalkan potensi kendala administratif maupun teknis.

c. Koordinasi dan Sinergi Antar Unit Kerja

Terjadinya koordinasi yang baik antara majelis hakim, kepaniteraan dan petugas teknis menjadi faktor penting dalam keberhasilan capaian ini. Sinergi tersebut memastikan bahwa setiap putusan yang telah diminutasasi segera ditindaklanjuti dengan proses pengunggahan secara tepat waktu dan berkesinambungan.

d. Monitoring dan Evaluasi Kinerja yang Berkelanjutan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kinerja pengelolaan putusan berperan signifikan dalam menjaga konsistensi capaian. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, setiap potensi keterlambatan dapat diidentifikasi dan segera ditindaklanjuti, sehingga target kinerja dapat dicapai secara optimal.

e. Komitmen Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Layanan

Keberhasilan pengunggahan putusan sebesar **125%** mencerminkan komitmen kuat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Capaian ini tidak hanya memenuhi target indikator kinerja, tetapi juga memperkuat kepercayaan Masyarakat terhadap kualitas layanan peradilan yang diberikan.

Keberhasilan capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta dalam menjaga kualitas layanan peradilan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan para pencari keadilan. Capaian Tahun 2025 ini sekaligus menjadi baseline yang kuat dalam pengukuran kinerja pada tahun-tahun selanjutnya serta menjadi modal strategis dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

• Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya

Untuk indikator kinerja presentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja dengan periode empat tahun sebelumnya atau dalam rentang lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan indikator kinerja tersebut baru mulai ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data historis yang memadai sebagai dasar evaluasi komparatif antar periode. Dengan demikian, capaian kinerja tahun 2025 menjadi titik awal (Baseline) dalam pengukuran dan pemantauan kinerja indikator dimaksud pada tahun-tahun selanjutnya.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator	Satker	Target	Realisasi	Capaian
	Kinerja Utama				
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Persentase putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	PTUN Jakarta	80%	100%	125%
		PTUN Bandung	100%	100%	100%
		PTUN Jambi	100%	100%	100%

Tabel 3. 13. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.4 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan, seluruh satuan kerja telah memenuhi bahkan melampaui standar nasional yang ditetapkan. PTUN Jakarta menetapkan target 80%, dengan realisasi 100% dan capaian 125%, sehingga menunjukkan kinerja yang melampaui target (overachievement) dalam publikasi putusan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas peradilan. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa transparansi melalui publikasi putusan pada Direktori Putusan telah terlaksana dengan sangat baik di seluruh satuan kerja, dengan PTUN Jakarta menunjukkan kinerja melampaui target

Indikator Kinerja 1.5.		Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan putusan	penyelesaian eksekusi	35%	58,06%	165,89%

Tabel 3. 14. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan

- **Formula**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti eksekusi dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$$

- **Analisis Capaian**

Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima **31** perkara permohonan eksekusi dan telah diselesaikan sebanyak **18** perkara, sehingga realisasi indikator ini sebesar **58,06 %**

$$\text{Realisasi} = \frac{18}{31} \times 100\% = 58,06 \%$$

Target yang telah ditetapkan sebesar **35%**, sehingga jika dibandingkan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar **165,89%** sesuai target yang telah ditetapkan

$$\text{Capaian} = \frac{58,06}{35} \times 100\% = 165,89 \%$$

Sumber Data : Laporan Bulanan Data Perkara

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mencapai target **58,06%** persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara tidak terlepas dari sinergi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kinerja yang berjalan

secara efektif. Capaian ini didukung oleh beberapa Langkah yang dilakukan antara lain :

a. Tingginya Tingkat Kepatuhan Para Pihak Terhadap Putusan Pengadilan

Tidak banyak permohonan eksekusi putusan tata usaha negara selama tahun 2025 menunjukkan tingginya Tingkat kepatuhan para pihak terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kondisi ini mencerminkan bahwa putusan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak tanpa memerlukan Tindakan eksekusi

b. Kualitas Putusan Yang Jelas Dan Implementatif

Keberhasilan capaian indikator ini juga didukung oleh kualitas putusan yang disusun secara jelas, tegas dan mudah dipahami oleh para pihak. Putusan yang memiliki kejelasan amar dan pertimbangan hukum yang komprehensif meminimalkan potensi sengketa lanjutan serta mendorong pelaksanaan putusan secara mandiri

c. Pelayanan Administrasi Perkara Yang Responsif Dan Transparan

Pelayanan administrasi perkara yang responsif, transparan, dan komunikatif turut mendukung keberhasilan capaian indikator ini. Kejelasan informasi kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dan mekanisme pelaksanaan putusan mendorong kepatuhan serta mengurangi kebutuhan pengajuan eksekusi

d. Komitmen Pengadilan Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Efektif Dan Berkeadilan

Capaian indikator sebesar **165,89 %** mencerminkan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Tidak adanya

permohonan eksekusi menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan peradilan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara tuntas.

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya**

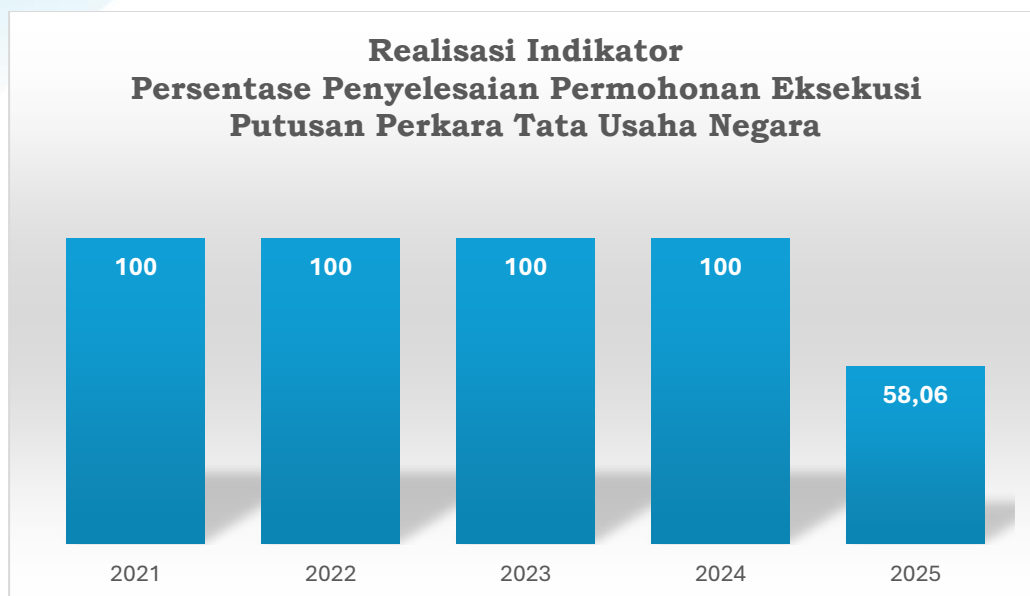
Berikut kami sampaikan dan persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara tata usaha negara dari tahun 2021 hingga 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah permohonan eksekusi putusan perkara tata usaha negara yang diselesaikan	14	17	24	13	18
Jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi	14	17	24	13	31
Realisasi (%)	100	100	100	100	58,06
Target (%)	100	100	100	50	35
Capaian (%)	100	100	100	200	165,89

Tabel 3. 15. Tabel Data Penyelesaian Permohonan Eksekusi dari Tahun 2021 – 2025

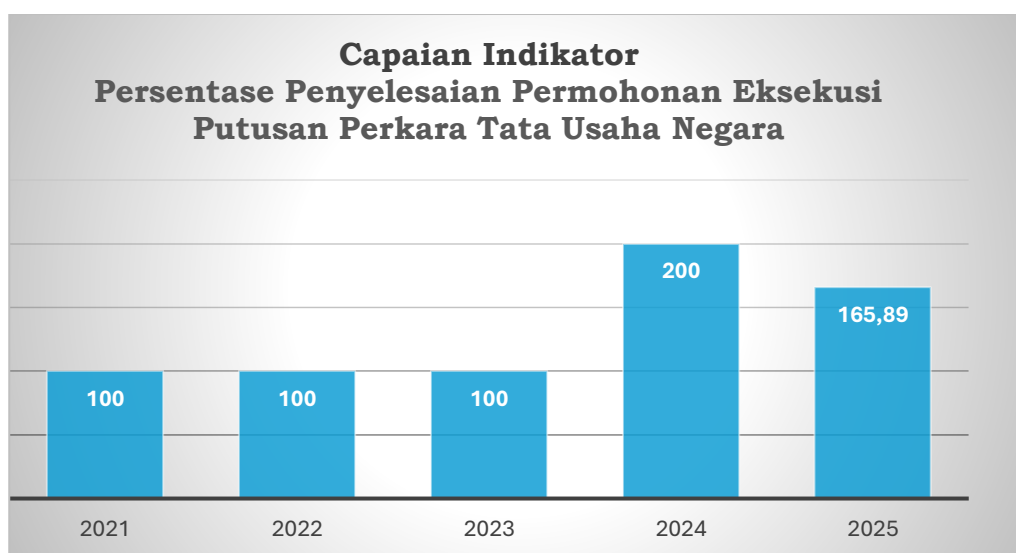
Sumber Data : Laporan Bulanan Data Perkara

Realisasi presentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara tata usaha negara dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada bagan berikut



Gambar 3. 5. Bagan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis 1.5

Sedangkan untuk capaian dari tahun 2021 hingga tahun 2025 dapat dilihat pada bagan berikut



Gambar 3. 6. Bagan Capaian Indikator Kinerja Utama
Sasaran Strategis 1.5

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi pada tahun 2025 terjadi penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya disebabkan permohonan eksekusi tidak terlalu banyak dan bisa diselesaikan di tahun yang sama. Hal tersebut bukan disebabkan menurunkan

kinerja, melainkan tidak cukupnya waktu dalam penyelesaian perkara eksekusi di tahun berjalan.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan adanya kenaikan dari tahun 2021 sampai 2023 sebanyak **65,89%** sedangkan dibanding tahun 2024 capaian kinerja tahun 2025 mengalami penurunan dikarenakan target pada tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dari 100% menjadi 50 %. Penurunan target tersebut disepakati dalam forum rapat bersama dengan pimpinan. Pada tahun 2025 target juga mengalami penurunan disesuaikan dengan penilaian capaian dari IKU terbaru.

Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dan pendewasaan dalam strategi perencanaan kinerja, dimana penetapan target tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian angka, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan standar kinerja yang lebih tinggi dan realistis. Strategi tersebut diharapkan mampu menjadi landasan dalam mendorong peningkatan kinerja yang berkesinambungan, memperkuat akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan	PTUN Jakarta	35%	58,06%	165,89%
		PTUN Bandung	65%	65.85%	101.31%
		PTUN Jambi	96%	100%	104,17%

Tabel 3. 16. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.5 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan, seluruh satuan kerja telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan fungsi eksekusi putusan pengadilan. PTUN Jakarta menetapkan target 35%, dengan realisasi 58,06% dan capaian 165,89%, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat melampaui target dalam penyelesaian permohonan eksekusi putusan. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa penyelesaian permohonan eksekusi putusan telah dilaksanakan secara efektif dan responsif di seluruh satuan kerja, dengan PTUN Jakarta menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan

Indikator Kinerja 1.6.	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court	98%	100%	102,04%

Tabel 3. 17. Tabel Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara TUN Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan E-Court

- **Formula**

Realisasi persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan *e-Court* dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$$

- **Analisis Capaian**

Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdapat 689 perkara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan, dan **689** perkara diajukan menggunakan *e-Court*, sehingga realisasi indikator ini sebesar **100%**.

$$Realisasi = \frac{689}{689} \times 100\% = 100\%$$

Sedangkan target yang telah ditetapkan sebesar **98 %**, sehingga jika dibandingkan antara realisasi dengan target diperoleh capaian sebesar **102,04 %** sesuai target yang telah ditetapkan

$$Capaian = \frac{100}{98} \times 100\% = 102,04\%$$

Sumber Data : Laporan Bulanan Data Perkara

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari beberapa faktor kunci, antara lain :

- a. Kebijakan Implementasi *E-Court* Secara Menyeluruh**

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh kebijakan internal Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menerapkan penggunaan *e-Court* secara menyeluruh terhadap seluruh perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding. Kebijakan tersebut memastikan bahwa setiap perkara yang diajukan telah terintegrasi dengan sistem peradilan elektronik sejak tahap pendaftaran, sehingga penggunaan *e-Court* dapat dilaksanakan secara konsisten dan tanpa pengecualian.

b. Pemahaman dan Kepatuhan Aparatur Pengadilan

Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memiliki pemahaman yang baik serta kepatuhan yang tinggi terhadap prosedur administrasi perkara berbasis elektronik. Kompetensi teknis aparatur dalam mengoperasikan aplikasi *e-Court* turut memperlancar proses penerimaan perkara dan meminimalkan hambatan administratif, sehingga seluruh perkara dapat didaftarkan melalui *e-Court* sesuai ketentuan.

c. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi yang Memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai menjadi faktor pendukung utama keberhasilan capaian ini. Sistem jaringan, perangkat pendukung, serta integrasi aplikasi peradilan elektronik yang berjalan dengan baik memungkinkan pelaksanaan *e-Court* secara optimal dan berkelanjutan.

d. Sosialisasi dan Pendampingan kepada Para Pencari Keadilan

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada para pencari keadilan terkait penggunaan *e-Court*. Melalui layanan bantuan dan pendampingan yang diberikan oleh petugas, para pihak dapat memahami tata cara pendaftaran perkara secara elektronik, sehingga tingkat penerimaan dan penggunaan *e-Court* dapat mencapai 100%.

e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan *e-Court*

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap penggunaan *e-Court* turut berperan dalam menjaga konsistensi capaian indikator. Dengan adanya pengawasan yang berkesinambungan, setiap kendala teknis maupun administratif

dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti, sehingga target penggunaan *e-Court* dapat tercapai secara optimal.

f. Komitmen terhadap Modernisasi dan Reformasi Peradilan

Keberhasilan capaian indikator ini mencerminkan komitmen kuat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mendukung modernisasi peradilan dan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Implementasi *e-Court* secara penuh tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat.

• Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya

Untuk indikator kinerja persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan *e-Court* oleh pengadilan pengaju kepada para pihak, pada Tahun 2025 belum dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja dengan periode empat tahun sebelumnya atau dalam rentang lima tahun terakhir seluruhnya. Karena sebelumnya hal ini disebabkan indikator kinerja tersebut baru mulai ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data historis yang memadai sebagai dasar evaluasi komparatif antarperiode. Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 menjadi titik awal (*baseline*) dalam pengukuran dan pemantauan kinerja indikator dimaksud pada tahun-tahun selanjutnya.

• Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan	Persentase Perkara Tata	PTUN Jakarta	98%	100%	102,04%

yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan E-Court	PTUN Bandung	100%	100 %	100%
		PTUN Jambi	100%	100 %	100%

Tabel 3. 18. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 1.6 . PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan E-Court, seluruh satuan kerja telah memenuhi bahkan melampaui standar nasional, yang menunjukkan keberhasilan implementasi layanan peradilan berbasis elektronik. PTUN Jakarta menetapkan target 98%, dengan realisasi 100% dan capaian 102,04%, sehingga menunjukkan kinerja yang melampaui target dalam penerapan sistem E-Court sebagai bagian dari modernisasi peradilan. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa digitalisasi layanan perkara melalui E-Court telah terlaksana dengan sangat baik di seluruh satuan kerja, mendukung terwujudnya peradilan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kemudahan akses layanan bagi masyarakat.

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator	Kinerja	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2.1.					
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar		3,87	3,84	3,85	3,86

layanan yang ditetapkan				
Target				3,70
Realisasi				3,85
Capaian				104,05

Tabel 3. 19. Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang ditetapkan

Sumber Data : E-Survei PTUN Jakarta

- **Formula**

Indikator kinerja indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dengan melihat dari :

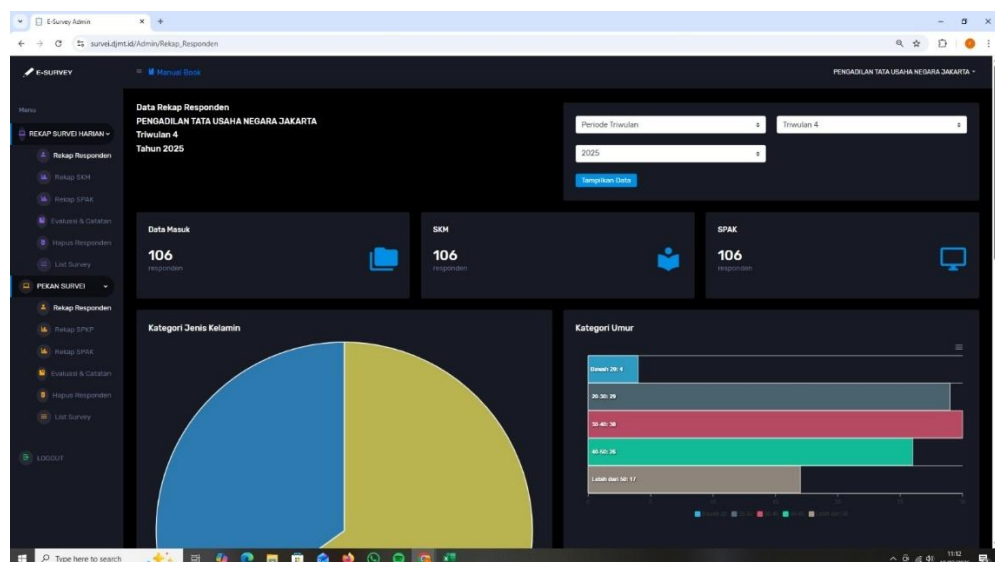
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

- **Analisis Capaian**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2025 melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebanyak 4 (empat) kali setiap triwulan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dari hasil penyusunan survei tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2025 memperoleh kategori :

- Triwulan I : kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah 3,87 atau konversi IKM sebesar 96,93%.

- Triwulan II : kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah 3,84 atau konversi IKM sebesar 96,05%.
- Triwulan III : kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah 3,85 atau konversi IKM sebesar 96,27%.
- Triwulan IV : kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah 3,86 atau konversi IKM sebesar 96,6%.
- Rekapitulasi penyusunan survei selama tahun 2025 diperoleh hasil : kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan adalah 3,85 atau konversi IKM sebesar 96,16%.



Gambar 3. 7. Tampilan Dashboard Aplikasi Survei IKM

Dari survei yang telah dilaksanakan didapatkan kesimpulan :

1. Hasil penyusunan Survei Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2025 yang diperoleh menunjukkan kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM 3,85 atau konversi IKM 96,16%.

2. Unsur-unsur pelayanan tertinggi dari hasil survei adalah :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan				Nilai Rata-Rata
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Persyaratan	4	3,92	3,98	3,88	3,94
2	Prosedur	3,88	3,92	3,9	3,85	3,88
3	Waktu Pelayanan	3,94	3,8	3,88	3,78	3,85
4	Biaya/Tarif	3,9	3,9	3,9	3,79	3,87
5	Produk Layanan	3,84	3,86	3,85	3,77	3,83
6	Kompetensi Pelaksana	3,92	3,88	3,86	3,83	3,87
7	Perilaku Pelaksana	3,85	3,9	3,78	3,88	3,85
8	Sarana & Prasarana	3,92	3,76	3,89	3,79	3,84
9	Penanganan pengaduan	4	3,99	3,97	3,79	3,93
Nilai Skala 4		3,87	3,84	3,85	3,86	3,85
Nilai Presentase		96,93	96,05	96,27	96,6	96,27
Mutu Pelayanan		A	A	A	A	A

Tabel 3. 20. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025

Sumber Data : Laporan SKM PTUN Jakarta

Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,70. Setelah dilakukan Survei IKM, maka

dapat diketahui indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan sebesar 3,85. Perhitungan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

$$Capaian = \frac{3,85}{3,70} \times 100\% = 104,05 \%$$

Dengan demikian capaian dari indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan telah tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari berbagai langkah strategis yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Hasil Evaluasi**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara rutin mengadakan rapat untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dan pelayanan. Dalam rapat ini, berbagai masukan dan saran dari masyarakat serta hasil monitoring internal dijadikan bahan perbaikan layanan. Proses ini mencerminkan komitmen kuat untuk terus meningkatkan standar pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pencari keadilan.

- b. Respon Positif dan Konstruktif dari Pencari Keadilan**

Tingginya indeks kepuasan pencari keadilan terhadap layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga disebabkan oleh adanya respon positif dan konstruktif dari para pencari keadilan terhadap berbagai layanan yang diberikan. *Feedback* ini menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pengadilan untuk terus memperbaiki diri dan mengimplementasikan inovasi layanan.

c. Minimnya Tingkat Keluhan Pencari Keadilan

Rendahnya tingkat keluhan mencerminkan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan yang diberikan. Hal ini terjadi karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selalu berusaha memastikan bahwa setiap pencari keadilan mendapatkan pelayanan yang cepat, ramah, transparan, dan profesional.

d. Inovasi dan Pendekatan Pelayanan yang Modern

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta juga secara konsisten memperkenalkan berbagai inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat, seperti penggunaan aplikasi berbasis digital untuk akses informasi perkara melalui SIPP Web, Aplikasi SIPITUNG, dan kecepatan dalam administrasi perkara maupun kesekretariatan.

e. Kualitas SDM yang Profesional dan Berintegritas

Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senantiasa meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui pelatihan, evaluasi berkala, dan pembinaan untuk memastikan pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat.

f. Peningkatan Fasilitas Sarana Prasarana

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara berkelanjutan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana guna menunjang kenyamanan para pencari keadilan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan ruang tunggu yang nyaman dan modern serta fasilitas minuman gratis. Peningkatan fasilitas ini mendukung terciptanya pelayanan peradilan yang ramah, humanis, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan langkah-langkah strategis ini, indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terus meningkat. Hal ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengadilan dalam

memberikan pelayanan prima tetapi juga menjadi bukti nyata dari komitmen untuk mewujudkan peradilan yang transparan, efisien, dan berkeadilan.

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya**

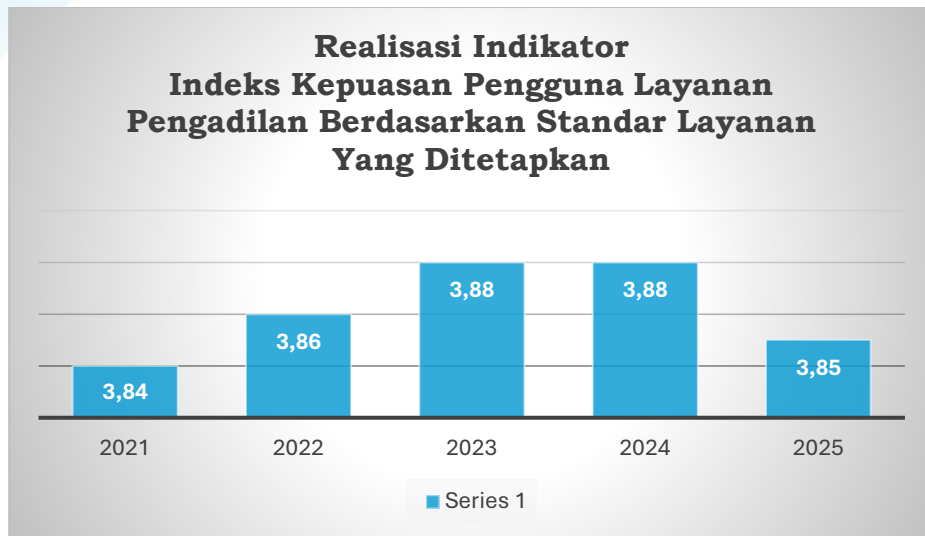
Untuk membandingkan capaian kinerja indikator ini, berikut kami tampilkan data hasil indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2021 hingga 2025.

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Realisasi	3,84	3,86	3,88	3,88	3,85
Target	3,6	4	4	2,6	3,7
Capaian (%)	106,67	96,5	97	149,23	104,05

Tabel 3. 21. Tabel Data Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2021 – 2025

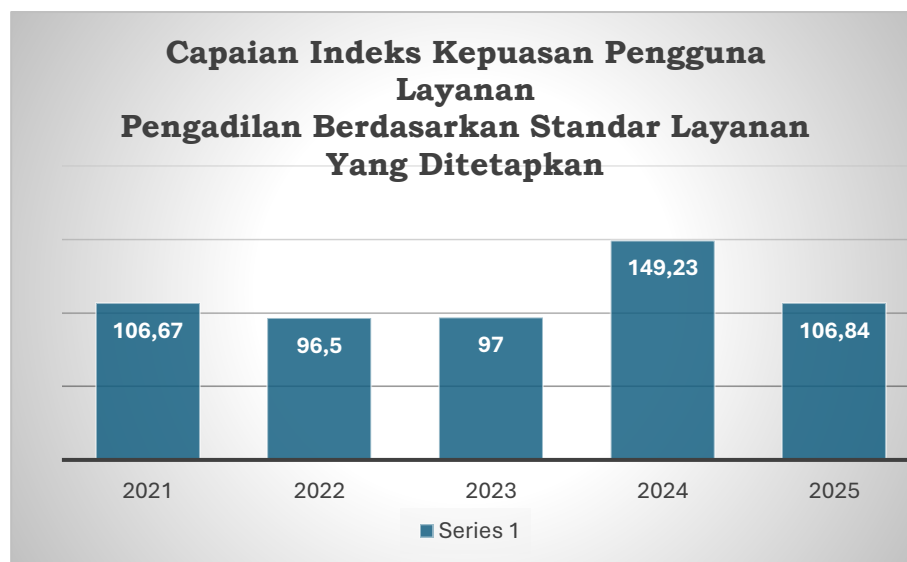
Sumber Data : Laporan SKM PTUN Jakarta

Realisasi indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 3. 8. Bagan Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2.1.

Sedangkan untuk capaian dari tahun 2021 hingga 2025 dapat dilihat pada bagan berikut :



Gambar 3. 9. Bagan Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1.2.

Pada tahun 2025, realisasi indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan penurunan dari tahun 2024. Meski demikian, penurunan ini disebabkan karena perubahan target yang lumayan signifikan dari 2,60 ke 3,70. Peningkatan target ini dicapai melalui berbagai upaya strategis,

seperti meningkatkan aksesibilitas bagi pihak-pihak di luar wilayah atau dengan keterbatasan fisik, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas sarana prasarana, serta menyediakan platform komunikasi yang efektif guna mendukung kolaborasi yang lebih baik di antara pemangku kepentingan.

Selain itu, peningkatan kompetensi petugas pelayanan juga memberikan dampak positif pada mutu layanan yang diberikan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara aktif memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi, pengumuman, serta menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat, serta transparansi dan keterjangkauan layanan semakin terjamin.

Penurunan kecil indeks kepuasan dibandingkan tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh kenaikan target kinerja yang lebih ambisius pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menetapkan standar pelayanan yang lebih tinggi, meskipun tantangannya semakin kompleks. Inovasi dan kolaborasi yang dilakukan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ini dan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel,	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	PTUN Jakarta	3,70	3,85	104,05%
		PTUN Bandung	95.00% 3,80	94.39% 3,77	99.36%

responsif, dan modern.	berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	PTUN Jambi	3,68	3,99	108,42%
-----------------------------------	--	---------------	------	------	---------

Tabel 3. 22. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 2.1. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan, secara umum tingkat kepuasan pengguna layanan pada seluruh satuan kerja berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan sebagian besar satuan kerja berhasil melampaui target yang ditetapkan. PTUN Jakarta menetapkan target 3,7, dengan realisasi 3,85 dan capaian 104,05%, sehingga menunjukkan bahwa kualitas layanan telah melampaui standar yang ditetapkan dan mendapatkan respons positif dari para pengguna layanan. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan pengadilan telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, dengan PTUN Jakarta dan PTUN Jambi menunjukkan kinerja yang melampaui standar

3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja 3.1.	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75%	78,08%	104,11%

Tabel 3. 23. Tabel Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Sumber Data : IP ASN Pada SIKEP PTUN Jakarta

- **Formula**

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan dengan melihat dari :

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari :

- a. Kompetensi (40%)**
- b. Kinerja (30%)**
- c. Kualifikasi (25%)**
- d. Disiplin (5%)**

- **Analisis Capaian**

Selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil mencapai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebesar **78,08%**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **75%**, dengan capaian kinerja sebesar **104,11%**. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah berjalan secara efektif, terencana, dan berorientasi pada peningkatan profesionalitas aparatur.

Tingginya nilai IP ASN tersebut merupakan hasil dari sinergi pemenuhan seluruh komponen penilaian, yang meliputi kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin. Pada aspek kompetensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara konsisten mendorong peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan. Sementara itu, aspek kinerja tercermin dari optimalnya pencapaian target kinerja individu dan unit kerja yang selaras dengan sasaran strategis organisasi.

Dari sisi kualifikasi, aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki latar belakang pendidikan dan jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan, sehingga mendukung pelaksanaan tugas secara profesional. Adapun pada aspek disiplin, penerapan kedisiplinan kerja dilaksanakan secara konsisten melalui kepatuhan pada jam kerja, tata tertib, serta ketentuan kepegawaian yang berlaku.

Capaian IP ASN yang melampaui target ini mencerminkan terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, serta menjadi modal strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan kepercayaan masyarakat pada tahun-tahun berikutnya.

Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 75%. Pada akhir tahun 2025, dapat diketahui Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan sebesar 78,08%. Perhitungan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{78,08\%}{75\%} \times 100\% = 104,11 \%$$

Dengan demikian capaian dari indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan telah tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan.

• Analisis Keberhasilan

Pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang melampaui target pada tahun 2025 merupakan cerminan keberhasilan penerapan nilai-nilai profesionalisme aparaturnya. Nilai IP ASN yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan peradilan yang berintegritas.

Keberhasilan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Peningkatan Kompetensi Aparatur

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara konsisten mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta pengembangan kapasitas berkelanjutan. Upaya ini menuntut aparatur memiliki kemampuan profesional dan adaptif dalam memberikan layanan peradilan yang cepat dan berkualitas.

b. Optimalisasi Kinerja Aparatur

Optimalnya capaian kinerja aparatur tercermin dari pemenuhan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja satuan kerja. Penerapan manajemen kinerja yang terukur dan akuntabel mengarahkan aparatur untuk memiliki tanggung jawab yang jelas atas pelaksanaan tugas dan hasil kerja yang dicapai.

c. Pemenuhan Kualifikasi Jabatan

Dari aspek kualifikasi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memastikan penempatan aparatur sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan standar jabatan. Kesesuaian ini mendukung profesionalisme aparatur baik terhadap kapasitas individu maupun terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

d. Penerapan Disiplin Kerja yang Konsisten

Disiplin kerja diterapkan secara konsisten melalui kepatuhan terhadap jam kerja, tata tertib, dan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Budaya disiplin ini menjadi fondasi dalam memperkuat integritas aparatur dalam menjalankan tugas.

Capaian IP ASN yang melampaui target ini menegaskan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan

manajemen peradilan yang transparan dan profesional, serta menjadi modal strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan dan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

- **Perbandingan antara realisasi capaian indikator Tahun 2025 dengan realisasi kinerja empat tahun sebelumnya**

Untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Tahun 2025 belum sepenuhnya dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja dengan periode empat tahun sebelumnya atau dalam rentang lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan indikator IP ASN pada satuan kerja pengadilan baru ditetapkan dan diukur secara komprehensif sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada tahun 2025, sehingga data historis yang memadai sebagai dasar evaluasi komparatif antarperiode belum sepenuhnya tersedia. Dengan demikian, capaian IP ASN Tahun 2025 menjadi titik awal (*baseline*) dalam pengukuran dan pemantauan tingkat profesionalitas aparatur pada tahun-tahun selanjutnya, serta menjadi referensi penting dalam penyusunan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	PTUN Jakarta	75%	78,08%	104,11%
		PTUN Bandung	80.70%	84.06%	104.16%
		PTUN Jambi	75%	81,65%	108,86%

Tabel 3. 24. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3.1. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan, seluruh satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan tingkat profesionalitas aparatur berada pada kategori baik dan terus mengalami peningkatan. PTUN Jakarta menetapkan target 75%, dengan realisasi 78,08% dan capaian 104,11%, sehingga menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas ASN telah melampaui standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa pembinaan, pengembangan kompetensi, serta penguatan integritas aparatur telah berjalan efektif di seluruh satuan kerja, sehingga mendukung terwujudnya sumber daya manusia peradilan yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi sesuai dengan standar nasional.

Indikator Kinerja 3.2.				Target	Realisasi	Capaian
Nilai	Indikator	Kinerja				
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)						
DIPA 01	Satuan Kerja			90%	91,89%	102,1%
Pengadilan						
Nilai	Indikator	Kinerja				
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)						
DIPA 05	Satuan Kerja			90%	85,92%	95,47%
Pengadilan						
Rata-Rata Nilai IKPA				90%	88,90%	98,78

Tabel 3. 25. Tabel Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Sumber Data : Monev Kemenkeu

- **Formula**

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan melihat dari :

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Revisi DIPA (10%)**
- b. Penyerapan Anggaran (20%)**
- c. Penyelesaian Tagihan (10%)**
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)**
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%)**
- f. Belanja Kontraktual (10%)**
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)**
- h. Capaian Output (25%)**

• **Analisis Capaian**

Pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar **91,89%** melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **90 %**. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dilaksanakan secara efektif, tertib, dan akuntabel, baik pada DIPA 01, dengan seluruh alokasi anggaran terealisasi secara optimal. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 sebesar **85,92%**, tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian ini dikarenakan penyerapan anggaran DIPA 05 pada bagian Pengamanan sidang tidak terserap secara optimal akibat tidak banyak sidang yang menarik perhatian masyarakat luas sehingga tidak membutuhkan anggaran lebih di bagian pengamanan sidang.

Keberhasilan capaian IKPA DIPA 01 tersebut mencerminkan kualitas perencanaan anggaran yang matang, konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, serta pengendalian anggaran yang berjalan secara berkelanjutan sepanjang tahun anggaran. Selain

itu, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara dan administrasi keuangan turut menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian nilai IKPA yang optimal. Serta realisasi yang masih kurang akan menjadi pembelajaran di tahun mendatang untuk penyerapan yang sesuai dengan target yang ditentukan.

Capaian ini tidak hanya menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi juga menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah berorientasi pada pencapaian *output* dan hasil kinerja yang nyata, sehingga langsung mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Persentase nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dan DIPA 05 Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar **90%**. Pada akhir tahun 2025 dapat diketahui nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan sebesar **102,1%** dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 sebesar **95,47%**. Perhitungan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian IKPA DIPA 01} = \frac{91,89\%}{90\%} \times 100\% = 102,1 \%$$

$$\text{Capaian IKPA DIPA 05} = \frac{85,92\%}{90\%} \times 100\% = 95,47 \%$$

Dengan demikian capaian dari indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan telah tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) untuk DIPA 01 sebesar **102,1%** dan DIPA 05 sebesar **95,47 %**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **90%**. Capaian ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif, tertib dan akuntabel pada seluruh komponen penilaian IKPA, baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 05. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku

Adapun penjabaran singkat keberhasilan realisasi capaian perkomponen IKPA di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Adalah sebagai berikut :

- **Revisi DIPA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan pengelolaan perencanaan anggaran secara matang sehingga revisi DIPA dapat ditekan seminimal mungkin dan dilaksanakan secara tepat sasaran. Hal ini menunjukkan kualitas perencanaan anggaran yang baik sejak awal tahun anggaran

- **Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran pada DIPA 01 terealisasi secara optimal dan tepat waktu, sejalan dengan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pengendalian anggaran yang konsisten sepanjang tahun

- **Penyelesaian Tagihan**

Seluruh tagihan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan diselesaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan, sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan maupun keterlambatan pembayaran. Hal ini mendukung kelancaran pelaksanaan anggaran dan tertib administrasi keuangan.

- **Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)**

Selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memerlukan dispensasi SPM, sehingga tidak terdapat pengurangan nilai IKPA. Kondisi ini menunjukkan kepatuhan satuan kerja terhadap jadwal dan mekanisme pengajuan SPM yang telah ditetapkan

- **Deviasi Halaman III DIPA**

Deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran dapat dikelola dengan baik dan berada dalam batas toleransi yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada DIPA 01 dan DIPA 05.

- **Belanja Kontraktual**

Pelaksanaan belanja kontraktual dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Tidak terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan kontrak yang berpotensi menurunkan nilai IKPA

- **Pengelolaan Uang Perediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)**

Pengelolaan UP dan TUP dilakukan secara tertib, akuntabel dan tepat waktu, baik dalam penggunaan maupun pertanggungjawabannya. Hal ini mendukung kelancaran operasional satuan kerja tanpa menimbulkan permasalahan administrasi keuangan

- **Capaian Output**

Seluruh output kegiatan yang direncanakan pada DIPA 01 dan DIPA 05 dapat direalisasikan secara optimal dan sesuai target. Pencapaian output yang maksimal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan hasil yang nyata dan

selaras dengan sasaran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Capaian Nilai IKPA DIPA 01 sebesar **102,1%** dan Nilai IKPA DIPA 05 sebesar **95,47%** ini menegaskan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan professional serta mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang efektif dan berorientasi pada kinerja

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya**

Untuk indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, pada tahun 2025 belum sepenuhnya dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja secara komprehensif dengan realisasi kinerja pada empat tahun sebelumnya atau dalam rentang lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian kebijakan, metode pengukuran, serta komponen penilaian IKPA yang berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun, sehingga data historis tidak sepenuhnya bersifat sebanding untuk dilakukan evaluasi komparatif secara langsung.

Dengan demikian, capaian IKPA DIPA 01 Tahun 2025 dengan nilai **102,1 %** dan capaian IKPA DIPA 05 Tahun 2025 dengan nilai **95,47%** dapat dijadikan sebagai titik awal (*baseline*) dalam pengukuran dan pemantauan kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun selanjutnya. Capaian ini sekaligus menjadi referensi penting dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran di Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta guna menjaga konsistensi pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator		Satker	Target	Realisasi	Capaian
	Kinerja Utama					
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Satuan Kerja Pengadilan	PTUN Jakarta	90%	91,89%	102,1%
				90%	85,92%	95,47%
				90%	88,91%	98,78%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Satuan Kerja Pengadilan	PTUN Bandung	98%	98.24%	100.24%
				95%	96,94%	102,04%
				95%	96,54%	101,62%
				95%	96,74%	101,83%%

Tabel 3. 26. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3.2. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, secara umum kinerja pelaksanaan anggaran pada seluruh satuan kerja telah mendekati atau melampaui target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel. PTUN Jakarta menetapkan target 90%, dengan realisasi 88,91% dan capaian 98,78%, yang berarti kinerja pelaksanaan anggaran hampir mencapai target dan masih perlu sedikit optimalisasi agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, indikator IKPA menunjukkan bahwa tata kelola pelaksanaan anggaran pada ketiga satuan kerja telah berjalan dengan baik sesuai standar nasional, dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi melampaui target, sementara PTUN Jakarta berada pada kategori baik dan perlu peningkatan minor untuk mencapai target secara penuh.

Indikator Kinerja 3.3.	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85%	95,95%	112,88%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	85%	87,95%	103,47%
Rata-Rata Nilai IKPA	85%	91,95%	108,17%

Tabel 3. 27. Tabel Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 & DIPA 05

Sumber Data : Monev Kemenkeu

• Formula

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 05 dengan melihat dari :

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :

- **Capaian indikator Sasaran Strategis K/L (25%)**
- **Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)**
- **Agregasi Capaian RO Satker (25%)**

b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan

• Analisis Capaian

Pada Tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara umum berhasil mencapai kinerja yang melampaui target pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran baik untuk DIPA 01 maupun DIPA 05. Target yang ditetapkan sebesar **85 %** telah

teralisasi dengan capaian **95,95 %** untuk DIPA 01 dan **87,95 %** untuk DIPA 05. Sehingga menghasilkan tingkat capaian kinerja masing-masing sebesar **112,88%** dan **103,47%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum perencanaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan terukur sesuai dengan sasaran strategis satuan kerja.

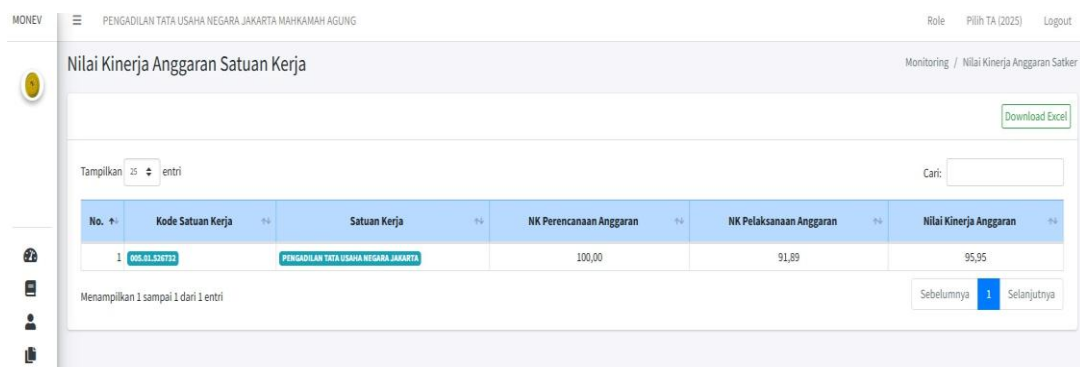
Capaian tersebut tidak terlepas dari terpenuhinya komponen efektifitas perencanaan anggaran yang memiliki bobot dominan sebesar **75%**, yang terdiri atas capaian indikator sasaran strategis Kementerian / Lembaga, Agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Unit Eselon I, serta agregasi capaian Rincian Output (RO) satuan kerja. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mampu menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan dengan sasaran strategis organisasi, sehingga output yang direncanakan dapat direalisasikan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja institusi.

Selain itu, aspek efisiensi perencanaan anggaran dengan bobot **25%** juga menunjukkan hasil yang positif. Pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan optimalisasi sumber daya, sehingga realisasi anggaran dapat mendukung pencapaian kinerja tanpa menimbulkan pemborosan. Hal ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam menyusun perencanaan anggaran yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga pada kualitas belanja dan manfaat yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 pada tahun 2025 mencerminkan bahwa proses perencanaan anggaran di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran strategis organisasi. Capaian ini menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pada tahun-tahun berikutnya, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Persentase Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 pada tahun 2025 masing-masing ditargetkan sebesar **85%**. Pada akhir tahun 2025, dapat diketahui nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 sebesar **95,95%** untuk DIPA 01 dan **87,95%** untuk DIPA 05. Perhitungan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

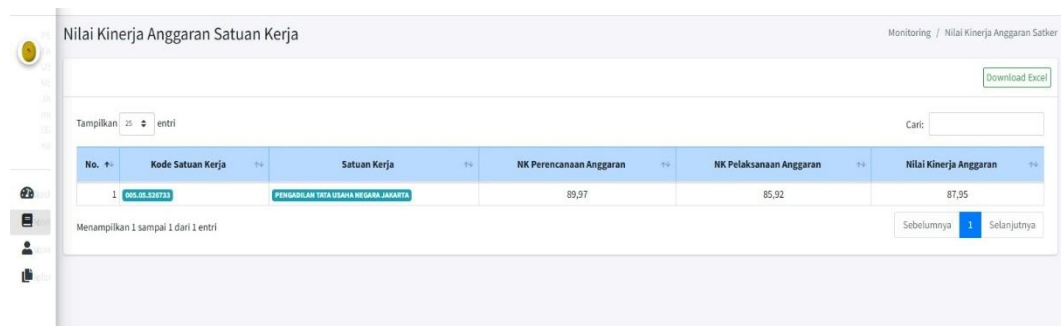
$$\text{Capaian DIPA 01} = \frac{95,95\%}{85\%} \times 100\% = 112,88\%$$



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	005.01.528722	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	100,00	91,89	95,95

Gambar 3. 10. Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 01 di Aplikasi Monev Kemenkeu

$$\text{Capaian DIPA 05} = \frac{87,95\%}{85\%} \times 100\% = 103,47\%$$



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	005.01.528722	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA	89,97	85,92	87,95

Gambar 3. 11. Nilai Kinerja Perencanaan DIPA 05 di Aplikasi Monev Kemenkeu

Dengan demikian capaian dari indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan Nilai Kinerja Perencanaan

Anggaran DIPA 05 telah tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan pencapaian indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 pada tahun 2025 merupakan hasil dari perencanaan anggaran yang disusun secara terukur, selaras dengan sasaran strategis, dan berorientasi pada kinerja, serta dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas dan integritas. Adapun analisis keberhasilan per item adalah sebagai berikut :

- 1. Capaian Indikator Sasaran Strategi K/L**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mampu menyelaraskan program dan kegiatan dalam DIPA 01 dan DIPA 05 dengan sasaran strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setiap kegiatan direncanakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, sehingga indikator sasaran strategis dapat dicapai secara optimal dan berkontribusi langsung terhadap nilai kinerja perencanaan anggaran

- 2. Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I**

Perencanaan anggaran telah mengacu pada indikator kinerja program unit Eselon I Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Keselarasan tersebut tercermin dalam konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja, sehingga capaian IKP dapat terakumulasi dengan baik dan mendukung keberhasilan perencanaan anggaran secara keseluruhan.

- 3. Agregasi Capaian Rincian Output (RO) Satuan Kerja**

Seluruh rincian output pada DIPA 01 dan DIPA 05 direncanakan secara realistis dan berbasis kebutuhan, sehingga dapat

direalisasikan sesuai target. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, memastikan output yang direncanakan tercapai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

4. Efisiensi Perencanaan Anggaran Satuan Kerja

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerapkan prinsip efisiensi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini tercermin dari kemampuan satuan kerja dalam mencapai target kinerja dengan penggunaan anggaran yang proporsional dan tepat sasaran.

- **Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya**

Untuk indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 pada Tahun 2025 belum sepenuhnya dapat dilakukan analisa perbandingan capaian kinerja secara komprehensif dengan realisasi kinerja pada empat tahun sebelumnya atau dalam rentang lima tahun terakhir. Hal tersebut disebabkan karena pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan penilaian kinerja tahun berjalan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan perencanaan anggaran, penyempurnaan metodologi penilaian, serta penyesuaian indikator efektivitas dan efisiensi yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengakibatkan data historis yang tersedia belum sepenuhnya bersifat sebanding untuk dilakukan evaluasi komparatif secara langsung.

Dengan demikian, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar **112,88%** dan DIPA 05 sebesar **103,47%** pada tahun 2025 dapat dijadikan sebagai titik awal (baseline) dalam pengukuran dan pemantauan kualitas perencanaan anggaran pada tahun-tahun selanjutnya. Capaian tersebut menjadi referensi strategis bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam melakukan

penyempurnaan perencanaan, penguatan keselarasan antara anggaran dan kinerja, serta peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	PTUN Jakarta	85%	95,95%	112,88%
			85%	87,95%	103,47%
			85%	91,95%	108,17%
		PTUN Bandung	94%	98.71%	105.01%
		PTUN Jambi	80%	100%	125%
			80%	85,49%	106,86%
			80%	92,74%	115,93%%

Tabel 3. 28. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3.3. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran, seluruh satuan kerja telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan kualitas perencanaan anggaran yang semakin baik, terukur, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas. PTUN Jakarta menetapkan target 85%, dengan realisasi 91,95% dan capaian 108,17%, sehingga menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah berjalan lebih efektif dari standar yang ditetapkan. Secara keseluruhan, indikator ini mencerminkan bahwa kemampuan satuan kerja dalam merencanakan anggaran telah memenuhi bahkan melampaui standar nasional, mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif, efisien, serta akuntabel.

Indikator Kinerja 3.4.	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,27	109%

Tabel 3. 29. Tabel Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Sumber Data : E-Sadewa PTUN Jakarta

- **Formula**

Indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan melihat dari :

Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

- **Analisis Capaian**

Pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tercermin dalam capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memperoleh indeks nilai sebesar **3,27** dengan tingkat capaian kinerja mencapai **109%**, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan aset di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan akuntabel, meliputi aspek perencanaan

kebutuhan BMN, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, serta pengawasan aset. Seluruh tahapan pengelolaan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan didukung oleh pemanfaatan sistem pengelolaan BMN secara optimal.

Nilai IPA yang melampaui target ini juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola aset sebagai bagian dari upaya mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan. Dengan pengelolaan aset yang baik, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mampu memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga dapat menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya manajemen peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, capaian Nilai Indeks Pengelolaan Aset pada tahun 2025 dapat dinilai sangat baik dan menjadi dasar yang kuat bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk terus melakukan penguatan tata kelola BMN secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak **3,27**. Pada akhir tahun 2025, dapat diketahui Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan sebesar **109%**. Perhitungan capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian IPA} = \frac{3,27}{3} \times 100\% = 109\%$$

Dengan demikian capaian dari indikator Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan telah tercapai lebih dari target yang telah ditetapkan.

- **Analisis Keberhasilan**

Keberhasilan capaian Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 tidak terlepas dari

berbagai langkah strategis dan konsisten yang telah dilaksanakan, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyusun perencanaan kebutuhan BMN secara terukur dan berbasis kebutuhan riil satuan kerja. Perencanaan dilakukan selaras dengan rencana kerja dan anggaran, sehingga aset yang tersedia benar-benar mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara efektif.

b. Penatausahaan BMN yang Tertib dan Akurat

Seluruh aset tercatat secara tertib dalam aplikasi pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku. Data aset diperbarui secara berkala dan dilakukan rekonsiliasi secara rutin, sehingga informasi aset akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pemanfaatan Aset Secara Optimal

BMN yang dimiliki dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pelayanan peradilan, baik dalam aspek operasional perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat aset yang menganggur sehingga efisiensi penggunaan aset dapat terjaga dengan baik.

d. Pengamanan dan Pemeliharaan Aset

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara konsisten melaksanakan pengamanan fisik, administrasi dan hukum terhadap aset yang dimiliki. Selain itu, pemeliharaan aset dilakukan secara berkala guna menjaga kondisi aset tetap layak pakai dan mendukung keberlanjutan pelayanan

e. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Aset

Pengawasan internal terhadap pengelolaan BMN dilaksanakan secara berkesinambungan melalui monitoring dan evaluasi. Hal

ini bertujuan untuk meminimalisasi potensi kesalahan administrasi serta memastikan seluruh proses pengelolaan aset berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Komitmen SDM dan Budaya Kerja Berintegritas

Keberhasilan pengelolaan aset juga didukung oleh komitmen aparatur dalam menerapkan budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas. Sinergi antar unit kerja menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas tata kelola aset yang akuntabel dan transparan.

Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berhasil mewujudkan pengelolaan aset yang efektif dan akuntabel, sehingga capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 dapat melampaui target yang ditetapkan dan menjadi fondasi yang kuat untuk peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

• Perbandingan Antara Realisasi Capaian Indikator Tahun 2025 Dengan Realisasi Kinerja Empat Tahun Sebelumnya

Untuk indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan, pada Tahun 2025 belum sepenuhnya dapat dilakukan analisis perbandingan capaian kinerja secara komprehensif dengan realisasi kinerja pada empat tahun sebelumnya atau dalam rentang lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan yang sangat dipengaruhi oleh dinamika kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penyempurnaan tata kelola aset, serta perkembangan teknologi penilaian kualitas pengelolaan aset yang terus mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mengakibatkan data historis yang tersedia belum sepenuhnya bersifat sebanding untuk dilakukan evaluasi komparatif secara langsung

Dengan demikian, capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 sebesar **3,27**



dengan tingkat capaian **109%** dapat dijadikan sebagai titik awal (baseline) dalam pengukuran dan pemantauan kualitas tata kelola aset pada tahun-tahun selanjutnya. Capaian ini menjadi referensi strategis bagi Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta dalam memperkuat perencanaan kebutuhan BMN, meningkatkan ketertiban administrasi dan pemanfaatan aset, serta mengoptimalkan pengamanan dan pemeliharaan aset secara berkelanjutan, guna mewujudkan pengelolaan aset yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

- **Perbandingan realisasi Kinerja dengan standar nasional**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satker	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	PTUN Jakarta	3	3,27	109%
		PTUN Bandung	3.425	3.250	94.89%
		PTUN Jambi	3	2,975	99,17%

Tabel 3. 30. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja IKU 3.4. PTUN Jakarta dengan PTUN Bandung dan PTUN Jambi

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional pada indikator kinerja utama Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan, capaian kinerja menunjukkan hasil yang bervariasi, dengan sebagian satuan kerja telah melampaui target, sementara lainnya mendekati target dan masih memerlukan optimalisasi. PTUN Jakarta menetapkan target 3, dengan realisasi 3,27 dan capaian 109%, sehingga menunjukkan kinerja pengelolaan aset yang melampaui standar nasional dan telah dilaksanakan secara tertib, efektif, dan akuntabel. Secara keseluruhan, indikator IPA menggambarkan bahwa pengelolaan aset pada satuan kerja telah berjalan cukup baik, dengan PTUN Jakarta menunjukkan kinerja

unggul, sementara PTUN Bandung dan PTUN Jambi perlu melakukan penguatan pengelolaan agar capaian dapat memenuhi bahkan melampaui standar nasional.

2. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029

Dalam mengukur capaian organisasi, juga dilakukan dengan membandingkan Capaian indikator kinerja tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Indikator	Realisasi s.d. tahun 2025	Target Jangka Menengah
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	79,47%	75%
Persentase penyelesaian / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	85%
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	85%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	80%

Indikator	Realisasi s.d. tahun 2025	Target Jangka Menengah
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perkara tata usaha negara	58,06%	35%
Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan E-Court	100%	98%
Indeks kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,85	3,70
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	78,08%	79%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	91,89% 85,92%	94%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95,95%	85%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	87,95%	
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,27	3,0

Tabel 3. 31. Tabel Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan analisis perbandingan data realisasi dan capaian kinerja, seluruh indikator kinerja berhasil tercapai. Keberhasilan dalam

mencapai realisasi kinerja ini didukung oleh pemanfaatan dan efisiensi sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, antara lain :

a. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didukung oleh tenaga kerja yang kompeten berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, yang terdiri dari

- 24 orang Hakim (1 Ketua, 1 Wakil Ketua, dan 22 Hakim)
- 1 Panitera
- 1 Sekretaris
- 2 Panitera Muda
- 3 Kepala Sub Bagian
- 20 Panitera Pengganti
- 2 Jusrita
- 4 Jusrita Pengganti
- 1 Pranata Keuangan APBN
- 2 Analis SDM Aparatur
- 1 Pranata Komputer
- 1 Operator Penata Layana Operasional
- 2 Klerek – Analis Perkara Peradilan
- 2 Klerek – Pengelola Penanganan Perkara
- 5 Klerek – Pengadministrasi Perkantoran
- 4 Calon Pegawai Negeri Sipil
- 1 Pengemudi
- 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

b. Sumber Daya Anggaran

Pengelolaan Anggaran secara efisien mencakup anggaran yang bersumber dari biaya proses (pihak ketiga) serta anggaran DIPA sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada bagian B bab ini

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta beroperasi di gedung seluas **2.189 m²** yang berdiri diatas lahan seluas **4.074 m²**. Fasilitas ini mendukung kegiatan operasional dan pelayanan yang optimal

d. Sumber Daya Peralatan dan Mesin

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memanfaatkan peralatan dan mesin modern, termasuk alat pengolah data, laptop, dan PC yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi kerja. Fasilitas ini memungkinkan Hakim dan Pegawai melaksanakan tugas serta fungsi mereka secara efektif

e. Sumber Daya Metode

Standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas, memastikan keberhasilan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat diukur dan ditingkatkan secara berkelanjutan

f. Penerapan Inovasi Teknologi

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terus mengadopsi inovasi berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Diantara inovasi unggulan yang diterapkan adalah

Langkah-langkah ini memastikan bahwa pelayanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kemudahan serta kecepatan dalam layanan kepada masyarakat pencari keadilan.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator	Program/Kegiatan
1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern	
1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	- Penyelesaian perkara Tata Usaha Negara, meliputi: - Memberikan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan - Penyelesaian berkas perkara. - Penyelesaian Sisa Perkara. - Penyampaian berkas perkara banding, kasasi, PK dan Eksekusi yang lengkap dan tepat waktu. - Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu - Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara. - Pelaksanaan monitoring administrasi kepaniteraan tata kerja dan tata kelola Peradilan Tata Usaha Negara. - Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses penyelesaian perkara
1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	
1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	
1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	
1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata agama	
1.6 Persentase perkara perdata agama tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	

Indikator	Program/Kegiatan
	- Melakukan rapat berjenjang tentang kinerja organisasi
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	
2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	➤ Menyediakan infrastruktur, regulasi, dan standar teknis yang mendukung percepatan penyelesaian perkara ➤ Meningkatkan kapasitas aparatur peradilan dalam pengelolaan administrasi dan layanan perkara ➤ Pemanfaatan TI untuk penyelesaian perkara ➤ Sosialisasi layanan pengadilan melalui media sosial ➤ Memastikan kelompok rentan memperoleh akses yang adil terhadap layanan peradilan tata usaha negara
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	
3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP	- Pemetaan Kompetensi ASN dan Pengembangan

Indikator			Program/Kegiatan
ASN)	Satuan	Kerja	Kompetensi berbasis kebutuhan
Pengadilan			
3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan			- Melakukan penguatan disiplin dan kinerja ASN melalui rapat bulanan dan juga rapat tiap bagian kesekretariatan dan kepaniteraan
3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 serta Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05			- Percepatan realisasi anggaran yang berkualitas dan peningkatan ketepatan administrasi pembayaran
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan			- Pengendalian kontrak dan belanja modal serta melakukan reviu internal pelaksanaan anggaran
			- Melakukan Penyusunan Anggaran Berbasis kinerja serta meningkatkan kualitas data perencanaan
			- Melakukan penatausahaan BMN yang tertib , menginventarisir aset dan optimalisasi pemanfaatan aset serta pemeliharaan BMN

Tabel 3. 32. Tabel Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Sebagai bentuk komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, berkelanjutan, dan selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menindaklanjuti secara sistematis hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Surat Nomor 865/WKPT.TUN.W2-TUN/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memperoleh nilai **70,60** dengan predikat **BB (Sangat Baik)**. Meskipun demikian, evaluator memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan pada empat komponen utama manajemen kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Atas rekomendasi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyusun dan melaksanakan rencana aksi tindak lanjut sebagaimana tertuang dalam Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 (terlampir).

1. Tindak Lanjut pada Aspek Perencanaan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan berbagai langkah penyempurnaan pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Upaya tersebut antara lain dengan melengkapi bukti dukung reviu perencanaan kinerja, memastikan publikasi dokumen dilakukan secara tepat waktu melalui aplikasi e-SAKIP, serta menyelaraskan dokumen perencanaan strategis dan tahunan (Renstra, RKT, dan PKT) agar memiliki keterkaitan yang logis dan konsisten.

Perbaikan juga difokuskan pada penguatan kualitas pengukuran kinerja melalui penyusunan analisis indikator Perjanjian

Kinerja berbasis kriteria SMART serta penetapan target kinerja yang mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya. Pohon kinerja telah disempurnakan dengan menambahkan struktur jenjang jabatan fungsional pada kesekretariatan dan kepaniteraan, memperjelas hubungan cascading hingga ke tingkat individu melalui penyelarasan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta menggambarkan keterkaitan lintas fungsi (crosscutting) secara lebih komprehensif.

Selain itu, telah disusun laporan ketercapaian kinerja berbasis aktivitas sesuai SOP yang didukung hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. Pengadilan juga menambahkan laporan monitoring triwulanan Tahun 2024 yang memuat capaian kinerja dan realisasi anggaran, serta menyusun analisis perbaikan dokumen perencanaan antara dokumen awal dan hasil revidi. Langkah-langkah ini merupakan komitmen berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi SAKIP yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel dalam mendukung tata kelola peradilan yang profesional dan transparan.

2. Tindak Lanjut pada Aspek Pengukuran Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pada aspek pengukuran kinerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan penyempurnaan pedoman teknis pengukuran kinerja dengan menambahkan definisi operasional setiap indikator kinerja beserta formulasi pengukurannya. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keseragaman pemahaman, validitas data, serta konsistensi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data kinerja di seluruh unit kerja.

Selain itu, pengukuran kinerja telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan dan aktivitas pelaksanaan program/kegiatan. Hasil capaian indikator dianalisis secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan, sehingga dapat mendorong perubahan strategi pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Pengadilan juga telah menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan hasil pengukuran kinerja dengan perubahan alokasi anggaran serta efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pencapaian kinerja, sehingga tercipta penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan akuntabel.

3. Tindak Lanjut pada Aspek Pelaporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pada aspek pelaporan kinerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melengkapi data dukung pelaksanaan revidi berupa Kertas Kerja Revidi dan Catatan Hasil Revidi sebagai bukti proses penelaahan atas Laporan Kinerja. Selain itu, telah dilampirkan tangkapan layar (screenshot) publikasi LKjIP pada aplikasi Komdanas dan e-SAKIP Revidi sebagai bukti penyampaian laporan secara tepat waktu sesuai ketentuan.

Dokumen LKjIP juga telah disempurnakan dengan menyajikan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah serta perbandingan capaian kinerja dengan level nasional sebagai bentuk benchmarking kinerja. Untuk memperkuat fungsi pengendalian, telah disusun laporan kinerja triwulanan yang memuat informasi mengenai hambatan pelaksanaan, langkah tindak lanjut, serta strategi yang dilakukan dalam rangka memastikan pencapaian target pada setiap indikator Perjanjian Kinerja.

Selanjutnya, laporan kinerja telah dilengkapi dengan analisis perbandingan antara capaian fisik dan realisasi anggaran pada setiap sasaran strategis dan indikator kinerja, termasuk penjelasan mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian hasil. Informasi kinerja tersebut juga telah dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyesuaian dan pengalokasian anggaran berikutnya, sehingga tercipta keterkaitan yang jelas antara pelaporan

kinerja, pengambilan keputusan, dan peningkatan akuntabilitas organisasi.

4. Tindak Lanjut pada Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pada aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melengkapi dokumen pendukung pelaksanaan evaluasi berupa undangan, notulen rapat, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan. Selain itu, dilakukan analisis kesesuaian antara laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (TLHE) dengan rekomendasi sebelumnya beserta bukti dukung yang disampaikan oleh Tim APIP internal, guna memastikan bahwa tindak lanjut yang dilaksanakan relevan, akurat, dan berbasis hasil evaluasi terdahulu.

Evaluasi internal juga diperkuat dengan penelaahan dokumen yang telah direviu, meliputi laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024, notulen rapat TLHE tahun 2023, Laporan TLHE tahun 2023, serta dokumen LHE dan LKE terkait. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan pendalaman yang memadai berbasis data dan dokumen tersebut, termasuk laporan monev triwulanan, sehingga proses evaluasi tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dalam menilai kualitas implementasi SAKIP.

Selanjutnya, AKIP internal telah melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi serta memastikan seluruh rekomendasi tahun sebelumnya ditindaklanjuti sesuai arahan. Hasil evaluasi terhadap seluruh subbagian kepaniteraan dan kesekretariatan telah disajikan secara lebih komprehensif, dilengkapi analisis peningkatan akuntabilitas satuan kerja serta informasi mengenai efektivitas dan efisiensi kinerja sebagai dampak dari evaluasi internal, sehingga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola kinerja organisasi.

C. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh 2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA dengan nomor SP DIPA - 005.01.2.526732/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan total pagu Rp.15.896.553.000,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Juta Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dan SP DIPA- 005.05.2.526733/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan total pagu Rp. 81.750.000 (delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

SP DIPA-005.01.2.400920/2025 dalam pelaksanaannya telah mengalami revisi/perubahan sebanyak 14 (empat belas) kali. Revisi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas adanya kebijakan organisasi serta pergeseran antar keluaran dan jenis belanja. Sampai dengan akhir Desember 2025, jumlah pagu anggaran tercatat sebesar Rp18.572.150.000 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

SP DIPA-005.05.2.526733/2025 dalam pelaksanaannya mengalami revisi/perubahan sebanyak 5 (lima) kali yang disebabkan oleh adanya penyesuaian kebijakan organisasi. Selain itu, terdapat sebagian alokasi pada jenis belanja yang dikembalikan karena tidak digunakan. Adapun data terinci dalam tabel berikut :

1. DIPA 01 (SP DIPA- 005.01.2.526732/2025)

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (EBA.994.001)

MAK	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4.829.045.000	4.804.099.640	24.945.360	99.48

MAK	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
511119	Pembulatan Gaji PNS	61.000	58.855	2.145	96.48
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	361.754.000	359.574.398	2.179.602	99.40
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	119.988.000	118.329.790	1.658.210	98.62
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	38.200.000	37.800.000	400.000	98.95
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	786.015.000	781.890.000	4.125.000	99.48
511125	Belanja Tunj. PPh. PNS	107.497.000	105.738.806	1.758.194	98.36
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	251.525.000	249.849.000	1.676.000	99.33
511129	Belanja Uang Makan PNS	719.304.000	625.656.000	93.648.000	86.98

MAK	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	60.654.000	59.695.000	959.000	98.42
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	1.173.799.000	1.102.004.008	71.794.992	93.88
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	7.169.700.000	7.134.400.000	35.300.000	99.51
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	152.700.000	146.390.000	6.310.000	95.87
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.000	4.344	2.656	62.06
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	6.007.000	5.438.760	568.240	90.54
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1.530.000	1.261.088	268.912	82.42

MAK	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.054.000	7.097.160	956.840	88.12
511628	Belanja Uang Makan PPPK	45.725.000	28.441.000	17.284.000	62.20
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4.900.000	4.900.000	0	100
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	7.677.000	7.220.000	457.000	94.05
	JUMLAH	15.844.142.000	15.579.847.849	264.294.151	98.33

Tabel 3. 33. Tabel Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan (EBA.994.002)

MAX	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
A. KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN					
521111	Belanja Keperluan	546.177.000	545.108.834	1.068.166	99.80

MAX	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
	Perkantoran				
521811	Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi	68.250.000	64.607.789	3.642.211	94.66

B. LANGGANAN DAYA DAN JASA

521111	Belanja keperluan perkantoran	193.600.000	192.967.489	632.511	99.67
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Ke Pusat	3.800.000	3.656.000	144.000	96.21
522112	Belanja Langganan Telepon	6.000.000	3.654.124	2.345.876	60.90
522113	Belanja Langganan Air	1.000.000	0	1.000.000	0
522114	Belanja Sewa	26.000.000	25.980.000	20.000	99.92

MAX	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
C. PEMELIHARAAN KANTOR					
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306.647.000	306.644.870	2.130	100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	314.011.000	303.336.631	10.674.369	96.60
D. PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	83.656.000	82.918.000	738.000	99.12
521115	Honor Operasional Satuan Kerja	70.340.000	68.040.000	2.300.000	96.73
E. KOORDINASI KE PUSAT / TINGKAT BANDING					
524111	Belanja Perjalanan	12.450.000	1.772.000	10.678.000	14.23

MAX	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
	n Dinas Biasa				
524113	Belanja Perjalana n Dinas Dalam Kota	1.200.000	1.050.000	150.000	87.50
F. KOORDINASI KE KPPN / KANWIL/ KPKNL					
524111	Belanja Perjalana n Dinas Biasa	1.050.000	1.020.320	29.680	97.17
G. HAK DAN FASILITAS KEUANGAN HAKIM					
522141	Belanja Sewa	870.480.000	806.310.000	64.170.00 0	92.63
	JUMLAH	2.504.818.000	2.407.066.057	97.751.9 43	96.10

Tabel 3. 34. Tabel Realisasi Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi (EBD.953.051)

MAK	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
521211	Belanja Bahan	300.000	300.000	0	100

Tabel 3. 35. Tabel Realisasi Layanan Pemantauan dan Evaluasi

d. Layanan Sarana Internal Pengadaan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran (EBB.951.053)

MAK	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.190.000	221.917.500	272.500	99.88

Tabel 3. 36. Tabel Realisasi Layanan Sarana Internal Pengadaan

e. Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan (EBA.962.051)

MAK	Uraian	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700.000	700.000	0	100

Tabel 3. 37. Tabel Realisasi Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan

2. DIPA 05 (SP DIPA- 005.05.2.526733/2025)

MAK	Uraian3	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
AEA.002	AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara				
521211	Belanja Bahan	29.845.000	24.400.000	5.445.000	81.76

MAK	Uraian3	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
BCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara				
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180.000	180.000	0	100
521211	Belanja Bahan	225.000	225.000	0	100
QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara				
521211	Belanja Bahan	4.200.000	2.215.000	1.985.000	52.74
522131	Belanja Jasa Konsultan	28.800.000	28.800.000	0	100
	JUMLAH	63.250.000	55.820.000	7.430.000	88.25

Tabel 3. 38. Tabel Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA 05

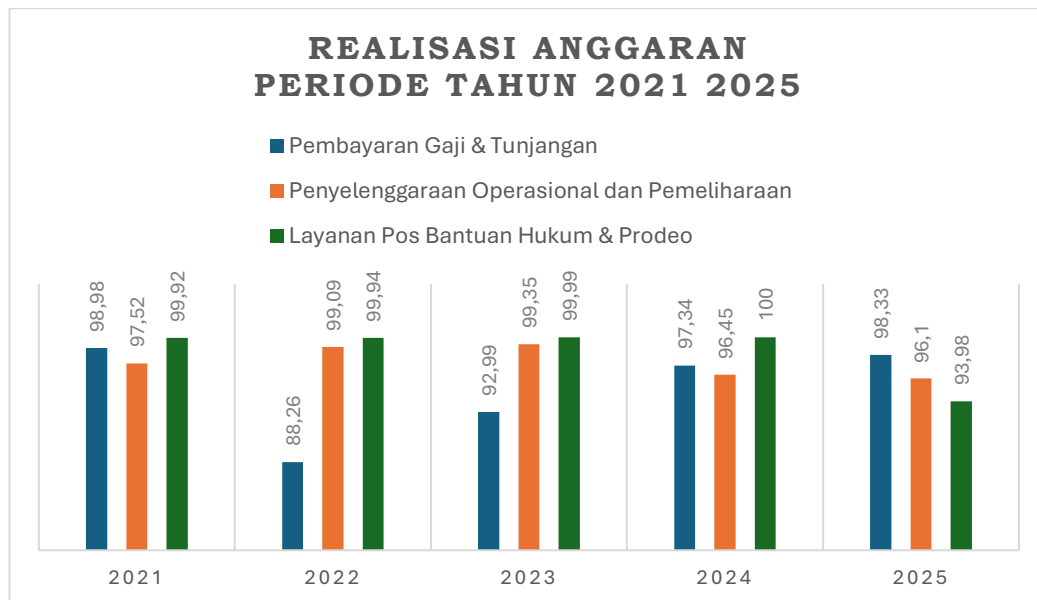
- **Perbandingan antara realisasi penyerapan terhadap pagu dalam periode Tahun 2025 dengan realisasi penyerapan empat tahun sebelumnya**

Berikut kami tampilan persentase realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu dari periode tahun 2021 hingga 2025 :

Uraian	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)
Pembayaran Gaji dan Tunjangan (6986.EBA.994.001)	98.98%	88.26%	92.99%	97.34%	98.33%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan (6986.EBA.994.002)	97.52%	99.09%	99.35%	96.45%	96.10%
Layanan Pos Bantuan Hukum (1053.QBA.003.051) dan Layanan Pembebasan Biaya Perkara (1053.QCA.001.051)	99.92%	99.94%	99.99%	100%	93.98%

Tabel 3. 39. Tabel Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran dari Tahun 2021 - 2025

Realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu dalam periode 2021 – 2025 sebagaimana terlihat dalam grafik berikut :





Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup laporan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025, kami menegaskan bahwa capaian yang diraih selama tahun tersebut merupakan hasil kerja sama, dedikasi, dan komitmen seluruh pihak yang terlibat. Laporan ini mencerminkan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025, selaras dengan Reviu Rencana Kinerja tahunan dan Reviu Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2025 – 2029.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan secara cermat melalui perbandingan antara target dan realisasi, yang hasilnya menunjukkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja dengan baik. Pelaksanaan tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara selama tahun 2025, baik dalam pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, pembinaan, maupun pengawasan, dapat dikatakan berhasil.

Pengembangan teknologi informasi juga menjadi sorotan penting dengan implementasi berbagai inovasi seperti Antrian Sidang, SI-Pitung (Sistem Pelayanan Informasi Unggulan), Si-Dul (Sistem Informasi Daftar Tamu Online), keterbukaan informasi melalui website, serta penggunaan media sosial untuk transparansi dan akuntabilitas publik. Peningkatan kualitas penyajian informasi yang semakin lengkap turut, mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Demi mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, langkah-langkah strategis telah dirumuskan untuk pelaksanaan di masa mendatang, antara lain :

1. Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan sesuai dengan hasil analisis beban kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk belanja modal guna memenuhi standar kebutuhan sarana dan prasarana aparatur peradilan;

3. Mengembangkan inovasi-inovasi yang telah diimplementasikan agar berskala nasional dan bisa dimanfaatkan lebih luas oleh seluruh lembaga peradilan di Indonesia.

Keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan Tahun 2025

Pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2025, menunjukkan hasil yang sangat optimal, dimana seluruh sasaran strategis & indikator kinerja utama yang telah ditetapkan berhasil memenuhi, bahkan melampaui target. Keberhasilan ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program kerja, efektivitas pengelolaan sumber daya, serta komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan peradilan yang modern profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern

Seluruh indikator pada sasaran strategis ini telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Penyelesaian perkara secara tepat waktu, terlaksana dengan baik, didukung oleh optimalisasi manajemen perkara, pemanfaatan teknologi informasi, serta disiplin kerja aparatur. Penyediaan dan pengiriman salinan putusan kepada para pihak dilaksanakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan peradilan.

Selain itu, pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) kepada para pihak juga terlaksana tepat waktu. Seluruh putusan pengadilan yang pernah diminutasi berhasil di unggah ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, sebagai wujud nyata keterbukaan informasi dan transparansi lembaga peradilan.

Pada aspek eksekusi, walaupun masih ada beberapa perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2025, tetapi capaian masih diatas target. Di sisi lain, penerapan *e-Court* telah dilaksanakan secara menyeluruh, dimana seluruh perkara Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding diajukan melalui sistem elektronik, menegaskan komitmen Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam mewujudkan peradilan berbasis teknologi informasi.

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan pada Tahun 2025 mencapai **3,85**, melebihi target yang ditetapkan yaitu **3,70**, atau dengan capaian **104,05%**. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pelayanan yang ramah, cepat, transparan, serta didukung sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor utama dalam meningkatkan kepuasan para pencari keadilan.

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Pada sasaran strategis ini, seluruh indikator kinerja berhasil dicapai sesuai target. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) menunjukkan tingkat profesionalitas aparatur yang sangat baik, didukung oleh peningkatan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin aparatur.

Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara optimal, tercermin dari capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 yang memenuhi target. Perencanaan anggaran DIPA 01 dan DIPA 05 juga menunjukkan kinerja yang baik, mencerminkan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja satuan kerja. Selain itu, pengelolaan aset negara dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, sehingga Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan mencapai target yang telah ditetapkan.

2. Ketidakberhasilan

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pada tahun 2025 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat dinyatakan berhasil hanya satu indikator kinerja sasaran strategis 3.2. yaitu realisasi nilai kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 05 yang tidak memenuhi target dikarenakan penyerapan anggaran DIPA 05 yang belum optimal dibagian pengamanan sidang akibat tidak banyak sidang yang menarik perhatian masyarakat luas.

3. Kendala atau Hambatan

Meskipun capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2025 secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa kendala dan hambatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut, antara lain :

- Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi informasi, khususnya ketersediaan laptop, printer, scanner, dan mesin fotokopi yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun spesifikasi teknis, yang berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas administrasi perkara dan dukungan terhadap inovasi layanan berbasis digital;

Oleh karena itu, berbagai langkah strategis dan rencana tindak lanjut yang telah diidentifikasi untuk tahun-tahun selanjutnya menjadi faktor kunci dalam mengatasi kendala tersebut. Upaya ini diarahkan untuk memperkuat dukungan sarana dan prasarana, meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

4. Langkah Strategis Tahun 2026

Dalam rangka menindaklanjuti berbagai capaian kinerja serta mengatasi kendala dan hambatan yang masih dihadapi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan langkah-langkah strategis untuk tahun 2026 yang diarahkan pada penguatan kinerja berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan, sebagai berikut :

a. Pemenuhan dan Modernisasi Sarana Teknologi Informasi

Mengusulkan pengadaan dan pembaruan perangkat teknologi informasi meliputi laptop, printer, scanner, dan mesin fotokopi dengan spesifikasi yang memadai, baik melalui perencanaan anggaran rutin maupun optimalisasi dukungan anggaran pusat, guna menunjang kelancaran administrasi perkara dan penguatan layanan peradilan berbasis digital.

b. Penyusunan Skala Prioritas Berbasis Kebutuhan Layanan

Menetapkan skala prioritas pemenuhan sarana, prasarana, dan program layanan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat, sehingga keterbatasan anggaran dapat dikelola secara efektif dan tepat sasaran.

c. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Strategi

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan, guna memastikan efektivitas pelaksanaan serta melakukan penyesuaian kebijakan secara tepat dan berkelanjutan.

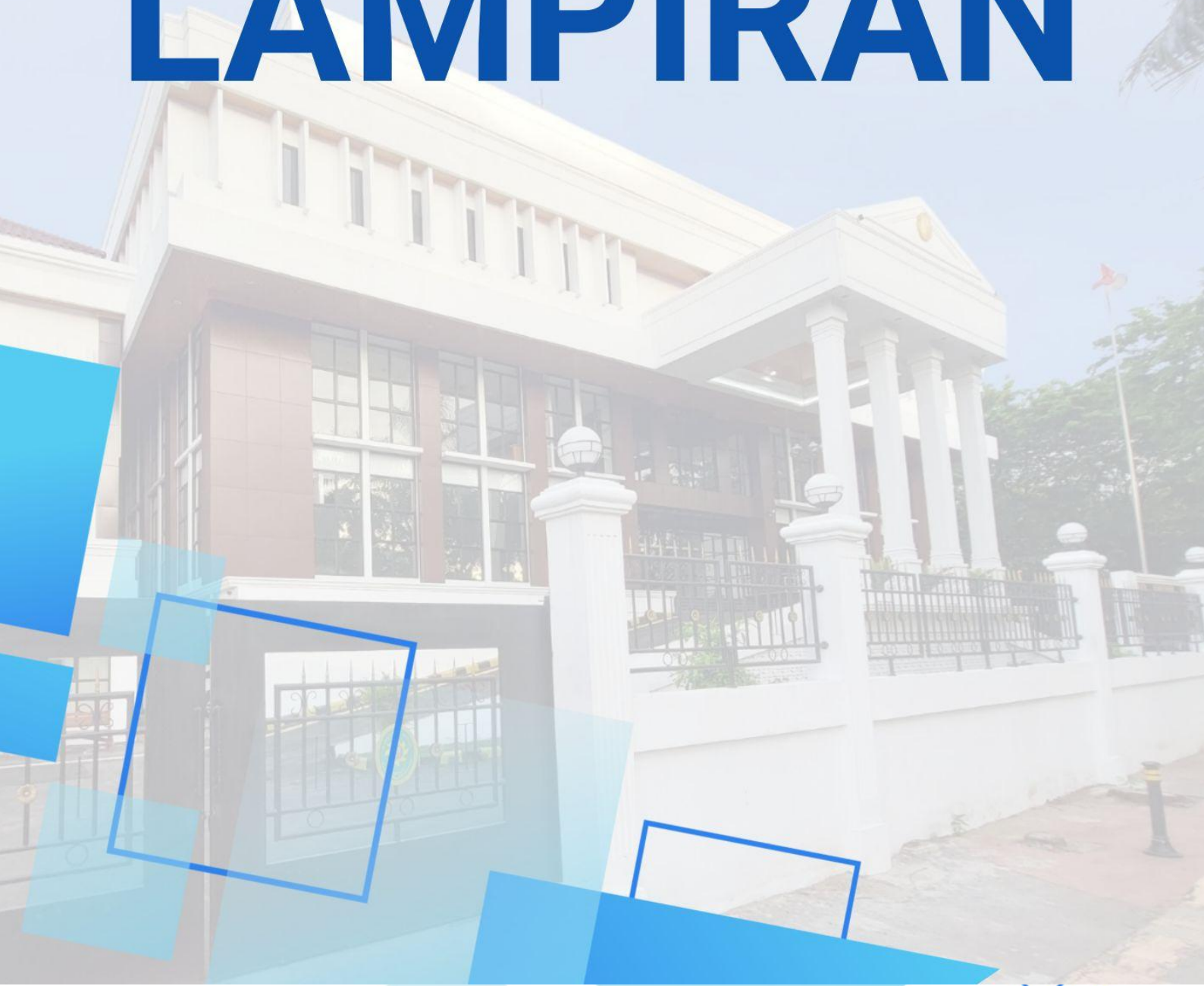
Dengan konsolidasi yang solid, perencanaan yang terarah, serta komitmen bersama seluruh aparatur, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta optimis mampu terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan peradilan yang semakin berkualitas pada tahun 2026. Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak atas dedikasi, integritas, dan kerja sama yang telah terjalin, sehingga capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat diraih dengan baik.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun.



Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

LAMPIRAN



**FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

No.	Pernyataan	Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari

No.	Pernyataan		Check List
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. IKU dan IK telah SMART	√

Jakarta, 27 Februari 2026

H. Husban, S.H.,M.H.
NIP. 197212231992031002

PENGHARGAAN

Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 yaitu Meraih Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Ke-I untuk Pelaksanaan E-Litigasi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Beban Perkara > 100 dari Mahkamah Agung RI





KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 2944/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data / informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20M.PAN/11 /2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 176/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/1/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT :** Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sebaik mungkin;
- KELIMA :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN :** Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 NOMOR : 2944/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.1/IX/2025
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Ketua	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Koordinator Validasi Data	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Sekretariat	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Anggota	1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Kepegawaian dan Ortala Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 4. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 5. Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 16 September 2025


KETUA PTUN JAKARTA
 Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN


Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Mewujudkan Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1. Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	-Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	76%	70%	75%	75%	80%	80%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkar a Huku m perseor angan	1 Perk ara	DIPA 05
												- Layana n Bantua n Huku m	96 Oran g	DIPA 05
												- Pelaks anaan Penga manan Sidang	1 Kegi atan	DIPA 05
												- Perkar a yang dilayan i di	1 Perk ara	DIPA 05

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
												luar Gedun g PTUN Jakart a		
			- Persen tase penye diaan/ pengiri man salina n putus an tepat waktu oleh penga dilan tingka	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Penega kan dan Pelayan an Hukum	Pening katan Manaje men Peradil an Tata Usaha Negara	- Perkar a Huku m perseo rangan	1 Perk ara	DIPA 05
												- Layana n Bantua n Huku m	96 Oran g	DIPA 05
												- Pelaks anaan Penga manan Sidang	1 Kegi atan	DIPA 05

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
			t perta ma kepad a para pihak.									- Perkar a yang dilayan i di luar Gedun g PTUN Jakart a	1 Perk ara	DIPA 05
			- Persenta se pengiri man pemberi tahanan petikan/ amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Penega kan dan Pelayan an Hukum	Pening katan Manaje men Peradil an Tata Usaha Negara	Perkara Hukum perseora ngan	1 Perk ara	DIPA 05
												Layanan Bantuan Hukum	96 Oran g	DIPA 05
												Pelaksan aan Pengam anan Sidang	1 Kegi atan	DIPA 05
												Perkara yang dilayani di luar	1 Perk ara	DIPA 05

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
			oleh pengadil an pengaju kepada para pihak.									Gedung PTUN Jakarta		
			- Persenta se putusan pengadil an yang diungga h pada direktori putusan .	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Penega kan dan Pelayan an Hukum	Pening katan Manaje men Peradil an Tata Usaha Negara	- Perkar a Huku m perseor angan	1 Perk ara	DIPA 05
												- Layana n Bantua n Huku m	96 Oran g	DIPA 05
												- Pelaks anaan Penga manan Sidang	1 Kegi atan	DIPA 05

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
												- Perkar a yang dilayan i di luar Gedun g PTUN Jakart a	1 Perk ara	DIPA 05
			- Persenta se penyeles aian permoho nan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%	35%	35%	Penega kan dan Pelayan an Hukum	Pening katan Manaje men Peradil an Tata Usaha Negara	- Perkar a Huku m perseor angan	1 Perk ara	DIPA 05
												- Layana n Bantua n Huku m	96 Oran g	DIPA 05
												- Pelaks anaan Penga	1 Kegi atan	DIPA 05

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
												manan Sidang		
												- Perkar a yang dilayan i di luar Gedun g PTUN Jakart a	1 Perk ara	DIPA 05
			- Persenta se perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang	98%	98%	98%	98%	98%	98%	Penega kan dan Pelayan an Hukum	Pening katan Manaje men Peradil an Tata Usaha Negara	- Perkar a Huku m perseor angan	1 Perk ara	DIPA 05
												- Layana n Bantua n Huku m	96 Oran g	DIPA 05

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
			menggu nakan e-court.									- Pelaks anaan Penga manan Sidang	1 Kegi atan	DIPA 05
												- Perkar a yang dilayan i di luar Gedun g PTUN Jakart a	1 Perk ara	DIPA 05
		2. Me ningkat nya tingkat keyakin an dan kepercay aan publik	2.1 Ind eks kepuasa n penggun a layanan pengadil	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	Penega kan dan Pelayan an Hukum	Pening katan Manaje men Peradil an Tata Usaha Negara	- Perkar a Huku m perseor angan	1 Perk ara	DIPA 05
												- Layana n Bantua n	96 Oran g	DIPA 05

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
			an berdasar kan standar layanan yang ditetapk an.									Huku m		
												- Pelaks anaan Penga manan Sidang	1 Kegi atan	DIPA 05
												- Perkar a yang dilayan i di luar Gedun g PTUN Jakart a	1 Perk ara	DIPA 05
Terwuj udny a Manaje men	Mewuj udka n Manaje men	3. Ter wujudny a Manaje menPera dilan yang Transpa	3.1 Ind eks profesi onalita s Aparat ur Sipil	78%	75%	77%	79%	80%	80%	Progra m Dukun gan Manaje men	Pengad aan Sarana dan Prasara na di Lingku ngan	Layanan Sarana dan Prasara na Internal	Unit, m2, Pake t	DIPA 01

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
Peradil an yang Transp aran, dan Profesi onal	Peradil an yang Transp aran, dan Profesi onal	ran Dan Profesio nal	Negara (IP ASN) Satua n Kerja Penga dilan								Mahka mah Agung			
			3.2 Nila i indikat or kinerja pelaks anaan anggar an, (IKPA) Satua n Kerja	92%	90%	92%	94%	94%	94%	Progra m Dukun gan Manaje men	Pengad aan Sarana dan Prasara na di Lingku ngan Mahka mah Agung	Layanan Sarana dan Prasara na Internal	Unit, m2, Pake t	DIPA 01
										Dukun gan Manaje men	Layana n Dukun gan	2 Layanan , Laporan,		DIPA 01

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
			Penga dilan.							Admini strasi Kesekre taria tan	Manaje men Interna l	Dokume n, Rekome ndasi, Unit		
										Pengadi lan Tingkat Bandin g dan Tingkat Pertama	Layana n Manaje men Kinerja Interna l	1.0 Dokume n		DIPA 01
			3.3 Nila i kerja Perenc anaan Anggar an.	87%	85%	85%	85%	90%	90%	Progra m Dukun gan Manaje men	Pengad aan Sarana dan Prasara na di Lingku ngan Mahka mah Agung	Layanan Sarana dan Prasara na Internal	Unit, m2, Pake t	DIPA 01

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
										Dukun gan Manaje men Admini strasi Kesekre taria tan Pengadi lan Tingkat Bandin g dan Tingkat Pertama	Layana n Dukun gan Manaje men Intern al	2 Layanan , Laporan, Dokume n, Rekome ndasi, Unit		DIPA 01
											Layana n Manaje men Kinerja Intern al	1.0 Dokume n		DIPA 01
		3.4	Nilai Indikat or pengel olaan	3	3	3	3	3	3	Progra m Dukun gan Manaje men	Pengad aan Sarana dan Prasara na di Lingku ngan	Layanan Sarana dan Prasara na Internal	Unit, m2, Pake t	DIPA 01

Tujuan		Sasaran		Targ et Jang ka Mene ngah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikat or	Uraian	Indikator		202 5	2026	2027	2028	2029	Progra m	Kegiat an	Indikato r Kegiata n	Targ et	Ang gara n (Rp)
			Aset (IPA) Satua n Kerja Penga dilan.								Mahka mah Agung			
										Dukun gan Manaje men Admini strasi Kesekre taria tan Pengadi lan Tingkat Bandin g dan Tingkat Pertam a	Layana n Dukun gan Manaje men Interna l	2 Layanan , Laporan, Dokume n, Rekome ndasi, Unit		DIPA 01
											Layana n Manaje men Kinerja Interna l	1.0 Dokume n		DIPA 01

REVISI RENCANA AKSI KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%	70%	70%	70%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%	80%	80%	80%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%	98%	98%	98%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1059.AEA Koordinasi					3 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 63.250.000,-
	001 Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 29.845.000,-
2.	1059.BCA. Perkara Hukum Perseorangan					1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-
	001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara		√			1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-

3.	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.000.000,-
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	√	√	√	√	96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.000.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	2.1. Indeks kepuasan Pengguna Layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,70	3,70	3,75	3,75

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1059.AEA Koordinasi					1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 29.845.000,-
	001 Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 29.845.000,-
2.	1059.BCA. Perkara Hukum Perseorangan					1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-
	001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara		√			1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-

3.	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.000.000,-
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	√ √ √ √ 96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.000.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%	75%	75%	75%
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%	90%	90%	90%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.	85%	85%	85%	85%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,0	3,0	3,0	3,0

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	√	√		√	11 Unit	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 222.190.000
2.	6986.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	√	√	√	√	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi , Unit	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 18.349.660.000
3.	EBD.953 Layanan Manajemen Kinerja Internal				√	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 300.000

Jakarta, 17 Desember 2025

Ketua



H. HUSBAN, S.H., M.H.

NIP. 197212231992031002

RENCANA AKSI KINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	75%	75%	75%	75%
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%	85%	85%	85%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%	80%	80%	80%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%	35%	35%	35%
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%	98%	98%	98%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1059.AEA Koordinasi					4 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 76.311.000,-
	001 Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 25.000.000,-
2.	1059.BCA. Perkara Hukum Perseorangan					1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-
	001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara			√		1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-

3.	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan					96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.216.000,-
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	√	√	√	√	96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.216.000,-
4.	1059.QCA Perkara yang dilayani melalui sidang diluar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara					1 Kegiatan	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 17.690.000,-
	001 – Sidang di luar gedung pengadilan				√	1 Kegiatan	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 17.690.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.70	3.70	3.70	3.70

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1059.AEA Koordinasi					4 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 76.311.000,-
	001 Dukungan Penyelesaian Perkara	√	√	√	√	1 Kegiatan	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 25.000.000,-
2.	1059.BCA. Perkara Hukum Perseorangan					1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-
	001 Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara			√		1 Kegiatan	Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Rp. 405.000,-

3.	1059.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan				96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 33.216.000,-
	001 - Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	√	√	√	√	96 Orang	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara
4.	1059.QCA Perkara yang dilayani melalui sidang diluar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara				1 Kegiatan	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp. 17.690.000,-
	001 – Sidang di luar gedung pengadilan				√	1 Kegiatan	001 – Sidang di luar gedung pengadilan	Rp. 17.690.000,-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan				3.70
		3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	90%	90%	90%	90%
		3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran				85%
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				3.0

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rp)
		I	II	III	IV				
1.	1071.EBB Layanan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung				√	4 Unit	Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 20.000.000
2.	6986.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	√	√	√	√	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 21.069.933.000
3.	EBD.953 Layanan Manajemen Kinerja Internal				√	1 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 300.000

Jakarta, 27 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%
		b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Banding - Kasasi	32% 27%
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	65%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.	65%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	67%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%

Jakarta, 27 Februari 2025

Ketua


Oendon Pratiwi, S.H., M.H.
NIP. 197210261992032001

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2026**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	75%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%
		1.6. Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	1.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,70
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	77%
		3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	92%
		3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	85%
		3.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3,0

Jakarta, 27 Januari 2026

Ketua



H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HUSBAN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Desember 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta


H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.
NIP. 19590215 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta


H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	70%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3.70
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	75%
		3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	90%
		3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	85%
		3.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3.0

Kegiatan

Anggaran

1. Progam Dukungan Manajemen Rp. 18.349.960.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 222.190.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 63.250.000,-

Jakarta, 17 Desember 2025

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta



H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.
NIP. 19590215 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta



H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. HUSBAN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.
NIP. 19590215 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta

H. HUSBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	75%
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	85%
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	85%
		1.4 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	80%
		1.5 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara.	35%
		1.6 Persentase perkara tata usaha negara Tingkat pertama dan Tingkat banding yang menggunakan e-court.	98%

2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3.70
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	77%
		3.2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran, (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.	92%
		3.3 Nilai kerja Perencanaan Anggaran.	85%
		3.4 Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	3.0

Kegiatan

Anggaran

1. Progam Dukungan Manajemen Rp. 21.069.933.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 20.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 76.311.000,-

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta


H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.
NIP. 19590215 198612 1 001

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta


H. HUSEBAN, S.H., M.H.
NIP. 197212231992031002

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2024

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. PERENCANAAN								
1	Agar ditambahkan bukti dukung dokumen reviu perencanaan kinerja.	Belum ada dokumen reviu perencanaan kinerja	Telah dilengkapi dokumen reviu perencanaan kinerja	Setiap Akhir Triwulan	Triwulan	Seluruh Bagian PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Reviu Perencanaan Kinerja
2	Agar dokumen dipublikasikan secara tepat waktu melalui e-SAKIP Reviu Kementerian PANRB (tanggal/jam)	Dokumen sakiip belum dipublikasikan tepat waktu melalui e-SAKIP Reviu Kementerian PANRB	Sudah dipublikasikan tepat waktu lengkap dengan tanggal dan jam	2 Bulan dari surat SEKMA tentang SAKIP	Pertahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Data Publikasi Tepat Waktu
3	Agar . perlu dilengkapi dengan struktur jenjang jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan agar keterkaitan tugas antar fungsi dapat tergambarkan secara utuh dalam sistem <i>cascading</i> kinerja PTUN Jakarta.	Pohon Kinerja untuk di lengkapi dengan struktur jenjang jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan	Telah dilengkapi dengan struktur jenjang jabatan fungsional pada bagian Kesekretariatan dan kepaniteraan	1 Bulan	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Pohon Kinerja

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
4	Agar disusun dokumen perencanaan kinerja yang selaras (Renstra, RKT, PKT).	Dokumen perencanaan kinerja belum selaras	Dokumen Perencanaan Kinerja Sudah Selaras	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Dokumen Perencanaan Kinerja
5	Agar membuat dokumen analisa indikator Perjanjian Kinerja yang telah memenuhi kriteria SMART.	Belum terdapat dokumen analisa indikator Perjanjian Kinerja yang telah memenuhi kriteria SMART.	Dokumen Analisa indikator Perjanjian Kinerja telah memenuhi kriteria SMART	1 Tahun	1 Tahun	PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Dokumen Analisa IKU sesuai kriteria SMART
6	Agar dalam menetapkan target kinerja memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya.	Target kinerja belum disusun dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya	Target Kinerja sudah disusun dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya dan sudah melalui rapat dengan pimpinan	1 Tahun	1 Tahun	Seluruh Bagian PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Target Kinerja
7	Penjabaran pohon kinerja, perlu didukung oleh dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun secara berjenjang per bagian/sub bagian.	Dokumen SKP belum sepenuhnya disusun secara berjenjang per bagian/sub bagian sehingga penjabaran pohon kinerja kurang didukung dengan baik.	Penjabaran Pohon Kinerja sudah dilengkapi	1 Tahun	1 Tahun	Seluruh Bagian PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Pohon Kinerja

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
8	Agar memperbaiki pohon kinerja untuk menggambarkan <i>crosscutting</i> yang memadai.	Pohon kinerja belum sepenuhnya menggambarkan keterkaitan (<i>crosscutting</i>) antar sasaran dan unit kerja sehingga integrasi kinerja belum optimal.	Pohon kinerja sudah menggambarkan keterkaitan (<i>crosscutting</i>) antar sasaran dan unit	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Pohon Kinerja
9	Perlu disertai laporan yang menunjukkan ketercapaian kinerja berdasarkan aktivitas sesuai dengan SOP, baik melalui pelaksanaan maupun hasil monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SOP tersebut.	Laporan kinerja belum sepenuhnya disertai eviden yang menunjukkan Capaian Kinerja berdasarkan aktivitas sesuai SOP serta hasil monitoring dan evaluasinya.	Laporan Kinerja sudah disertai dengan Eviden	1 Tahun	1 Tahun	Seluruh Bagian PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Laporan Kinerja dan SOP serta hasil Money
10	Agar ditambahkan dokumen laporan monitoring per triwulan yang memuat capaian kinerja dan penggunaan anggaran pada tahun 2024.	Laporan monitoring capaian kinerja dan penggunaan anggaran belum disusun secara rutin per triwulan.	Laporan Monitoring Capaian kinerja sudah disusun rutin	1 Tahun	1 Tahun	Seluruh Bagian PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Laporan Monitoring Capaian Kinerja
11	Agar ditambahkan laporan analisa perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan (renstra, rkt, pkt) yang awal dan reviu.	Belum tersedia laporan analisa perbaikan atau penyempurnaan atas dokumen perencanaan (Renstra, RKT, PKT)	Sudah tersedianya laporan untuk dokumen (Renstra, RKT, PKT)	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Dokumen Perencanaan Kinerja

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
		baik versi awal maupun hasil reviu.						
B. Pengukuran Kinerja								
1	Agar memuat definisi operasional atas indikator kinerja dan formulasi pengukuran indikator kinerja dalam Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.	Pedoman teknis pengukuran kinerja belum memuat definisi operasional dan formulasi pengukuran indikator kinerja secara jelas sehingga menimbulkan potensi perbedaan pemahaman dalam pengumpulan data.	Pedoman Teknis Pengukuran sudah memuat definisi operasional dan formulasi pengukuran indikator kinerja	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Dokumen IKU dan Kamus IKU dan SK Pedoman Teknis
2	Agar memberikan informasi memadai terkait pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang menunjukkan pengaruhnya terhadap penyesuaian kebijakan untuk pencapaian kinerja.	Hasil Pengukuran kinerja sudah menyajikan informasi yang sesuai	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Hasil Pengukuran kinerja beserta informasi

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
3	Agar memberikan informasi memadai terkait pengukuran kinerja mempengaruhi aktivitas dalam mencapai kinerja	Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya memberikan informasi yang menunjukkan pengaruhnya terhadap aktivitas dalam mencapai kinerja.	Hasil pengukuran kinerja sudah memberikan informasi yang mempengaruhi aktivitas.	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Hasil Pengukuran kinerja beserta informasi
4	Agar memberikan informasi memadai terkait perubahan anggaran disebabkan pengukuran kinerja.	Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja dengan perubahan anggaran.	Laporan Kinerja terkait anggaran sudah sesuai.	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Realisasi Anggaran
5	Agar memberikan informasi memadai terkait efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja.	Sudah ditambahkan NK Perencanaan Satuan Kerja	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	NK Perencanaan PTUN Jakarta
C. Pelaporan Kinerja								

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1	Agar melampirkan data dukung pelaksanaan reuiu (Kertas Kerja Reuiu dan/atau Catatan Hasil Reuiu)	Data dukung pelaksanaan reuiu seperti Kertas Kerja Reuiu dan/atau Catatan Hasil Reuiu belum dilampirkan.	Data dukung pelaksanaan reuiu sudah dilampirkan	1 Tahun	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Data Dukung Kertas Kerja Reuiu
2	Agar melampirkan tangkapan layer (screenshot) publikasi LKjIP pada Komdanas dan e-SAKIP Reuiu tepat waktu.	Tangkapan layar (screenshot) publikasi LKjIP pada Komdanas dan e-SAKIP Reuiu belum sepenuhnya dilampirkan tepat waktu.	Sudah dipublikasikan tepat waktu lengkap dengan tanggal dan jam	2 Bulan dari surat SEKMA tentang SAKIP	Pertahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Data Publikasi Tepat Waktu
3	Agar disusun dokumen LKjIP yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan jangka menengah.	Dokumen LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Sudah ditambahkan Perbanding Realisasi kinerja dengan target jangka menengah	1 Tahun	Pertahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Dokumen LKjIP Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah
4	Agar disusun dokumen LKjIP yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Dokumen LKjIP belum memuat perbandingan realisasi kinerja dengan capaian kinerja pada level nasional maupun	Dokumen LKjIP sudah memuat perbandingan realisasi kinerja dengan capaian pada Level Nasional dan Internasional	1 Tahun	Pertahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Dokumen LKjIP

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
		internasional (<i>benchmark</i> kinerja).						
5	Agar disusun dokumen laporan kinerja per triwulan yang menyajikan informasi mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja pada setiap indikator (PK) selama periode pemantauan.	Laporan kinerja per triwulan belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai hambatan dan upaya pencapaian target pada setiap indikator kinerja (PK).	Laporan Kinerja per triwulan sudah menyajikan informasi tersebut	1 Tahun	Pertahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Laporan Kinerja
6	Agar disusun laporan kinerja yang memberikan Informasi perbandingan capaian fisik dan realisasi anggaran untuk tiap sasaran strategis dan indikator kinerja.	Laporan kinerja belum menyajikan informasi perbandingan capaian fisik dan realisasi anggaran untuk tiap sasaran strategis dan indikator kinerja.	Laporan Kinerja sudah menyajikan informasi perbandingan capaian fisik dan realisasi anggaran.	1 Tahun	Pertahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Laporan Kinerja
7	Agar memberikan informasi memadai terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.	Laporan kinerja sudah menyajikan informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja.	1 Tahun	Pertahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Laporan Kinerja NKPA

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
8	Agar memberikan penjelasan bahwa informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian anggaran.	Laporan kinerja belum memberikan penjelasan yang menunjukkan pemanfaatan informasi kinerja dalam proses penyesuaian anggaran.	Laporan Kinerja NKA	1 Tahun	Pertahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Laporan Kinerja NKPA

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1	Agar dilengkapi dokumen pendukung evaluasi internal berupa (undangan, notulen, daftar hadir, foto). Selain itu, agar dilakukan analisis kesesuaian laporan TLHE terhadap rekomendasi dan bukti dukung yang dilampirkan oleh Tim APIP Internal PTUN Jakarta, guna memastikan tindak lanjut yang diambil relevan, akurat dan berbasis evaluasi sebelumnya.	Dokumen pendukung evaluasi internal (undangan, notulen, daftar hadir, foto) belum sepenuhnya dilampirkan, serta analisis kesesuaian laporan TLHE dengan rekomendasi dan bukti dukung belum dilakukan secara optimal, sehingga tindak lanjut belum sepenuhnya	Dokumen Pendukung sudah dilampirkan					Dokumen Pendukung evaluasi internal
---	--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	---

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
		berbasis evaluasi sebelumnya.						
2	Agar dilengkapi dengan dokumen yang telah direviu, mencakup hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024, notulen rapat TLHE tahun 2023, serta Laporan TLHE tahun 2023 sebagai bagian dari bukti dukung pelaksanaan evaluasi secara menyeluruh.	Dokumen hasil reviu, termasuk monitoring dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024, notulen rapat TLHE 2023, serta Laporan TLHE 2023 belum sepenuhnya tersedia sebagai bukti dukung evaluasi secara menyeluruh.	Dokumen hasil reviu sudah tersedia	1 Tahun	1 Tahun	Seluruh Bagian PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Dokumen Hasil Reviu
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai berbasis dokumen seperti laporan monev per triwulan tahun 2024, LHE dan TLHE tahun 2023 (undangan, notulen, daftar hadir, foto, laporan TLHE), dan LKE 2024.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai serta belum sepenuhnya berbasis dokumen pendukung (laporan monev triwulan 2024, LHE dan TLHE 2023, serta LKE 2024).	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sudah dilaksanakan secara memadai	1 Tahun	1 Tahun	Seluruh Bagian PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
4	Agar AKIP internal PTUN Jakarta melakukan pemantauan akan hasil tindak lanjut rekomendasi.	Pemantauan terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi AKIP internal PTUN Jakarta belum dilaksanakan secara optimal.	Pemantauan terhadap hasil tindak lanjut rekomendasi AKIP internal PTUN Jakarta sudah dilaksanakan secara optima	1 Tahun	1 Tahun	Tim SK AKIP Internal	Sudah Selesai	Data Dukung
5	Agar seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.	Belum semua rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya ditindaklanjuti sesuai arahan yang diberikan.	Rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya ditindaklanjuti	1 Bulan	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Rekomendasi Hasil Evaluasi tahun sebelumnya
6	Agar hasil evaluasi internal terhadap seluruh subbagian kepaniteraan dan kesekretariatan disajikan secara memadai, serta dilengkapi dengan analisis peningkatan akuntabilitas satuan kerja pasca evaluasi.	Hasil evaluasi internal terhadap subbagian kepaniteraan dan kesekretariatan belum disajikan secara memadai serta belum dilengkapi analisis peningkatan akuntabilitas satuan kerja pasca evaluasi.	Hasil evaluasi internal terhadap subbagian kepaniteraan dan kesekretariatan sudah ditindaklanjuti	1 Tahun	1 Tahun	Tim SK AKIP Internal	Sudah Selesai	Hasil evaluasi internal terhadap seluruh subbagian kepaniteraan dan kesekretariatan

No	Rekomendasi LHE Tahun	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
7	Agar menambahkan informasi dan data dukung yang memadai terkait efektifitas dan efisinesi kinerja hasil dari evaluasi akuntabiliktas kinerja internal.	Informasi dan data dukung mengenai efektifitas dan efisiensi kinerja hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum disajikan secara memadai.	Informasi dan data dukung mengenai efektifitas dan efisiensi kinerja hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah disajikan secara memadai	1 Bulan	1 Tahun	PTIP PTUN Jakarta	Sudah Selesai	Informasi dan data dukung

Jakarta, 27 Februari 2026

Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta,



H. Husban, S.H., M.H.

NIP. 197212231992031002